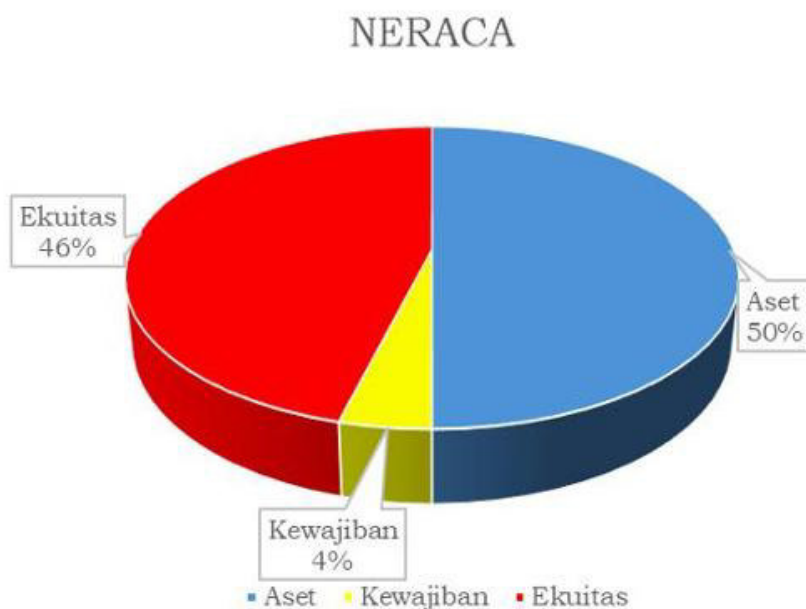


5.3 Neraca

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2024 secara umum digambarkan sebagai berikut:



Gamabr 5.11 Komposisi Neraca Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024

5.3.1 Aset

Saldo Aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lancar	863.415.737.426,76	822.663.146.998,27	40.752.590.428,49	4,95
Investasi Jangka Panjang	6.915.708.269.354,89	6.851.124.152.537,51	64.584.116.817,38	0,94
Aset Tetap	10.422.663.292.333,20	9.196.574.447.919,61	1.226.088.844.413,59	13,33
Dana Cadangan	0,00	173.517.943.404,98	(173.517.943.404,98)	(100,00)
Aset Lainnya	261.737.503.949,75	272.722.880.246,43	(10.985.376.296,68)	(4,03)
Properti Investasi	702.536.128.035,03	647.976.208.448,03	54.559.919.587,00	8,42
Jumlah	19.166.060.931.099,63	17.964.578.779.554,80	1.201.482.151.544,80	6,69

Tabel di atas menunjukkan Aset per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp1.201.482.151.545,20 atau 6,69%.

5.3.1.1 Aset Lancar

Saldo Aset Lancar yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas Dan Setara Kas	623.732.459.203,32	169.132.579.976,58	454.599.879.226,74	268,78
Piutang Pajak Daerah	49.838.810.531,04	52.151.207.987,00	(2.312.397.455,96)	(4,43)
Piutang Retribusi Daerah	881.023.472.856,43	156.460.000,00	880.867.012.856,43	562.998,22
Piutang Lain-Lain Pad Yang Sah	3.287.603.356,37	880.979.582.565,95	(877.691.979.209,58)	(99,63)
Piutang Lainnya	3.709.104.636,00	19.397.418.583,00	(15.688.313.947,00)	(80,88)
Penyisihan Piutang	(862.191.285.296,38)	(441.486.542.337,58)	(420.704.742.958,80)	95,29
Beban Dibayar Dimuka	490.726.285,24	471.686.083,46	19.040.201,78	4,04
Persediaan	163.524.845.854,74	141.860.754.139,86	21.664.091.714,88	15,27
Jumlah	863.415.737.426,76	822.663.146.998,27	40.752.590.428,49	4,95

Tabel di atas menunjukkan Aset Lancar per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp40.752.590.428,49 atau 4,95%.

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas di Kas Daerah	540.047.220.034,96	90.752.218.379,35	449.295.001.655,61	495,08
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	4.495.970.420,00	(4.495.970.420,00)	(100,00)
Kas di BLUD	75.472.024.913,26	65.789.692.069,52	9.682.332.843,74	14,72
Kas Dana BOS	0,00	7.933.065.066,71	(7.933.065.066,71)	(100,00)
Kas Lainnya	3.056.472.412,70	161.634.041,00	2.894.838.371,70	1.790,98
Kas Dana BOSP	5.156.741.842,40	0,00	5.156.741.842,40	100,00
Jumlah	623.732.459.203,32	169.132.579.976,58	454.599.879.226,74	268,78

Tabel di atas menunjukkan Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp454.599.879.226,74 atau 268,78%. Penjelasan saldo Kas dan Setara Kas beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas di Kas Daerah	540.047.220.034,96	90.752.218.379,35	449.295.001.655,61	495,08
Jumlah	540.047.220.034,96	90.752.218.379,35	449.295.001.655,61	495,08

Tabel di atas menunjukkan Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp449.295.001.655,61 atau 495,08% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali per tanggal neraca berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Buku Kas Umum Daerah dengan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Bali Nomor 010.01.00.00000-1 di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
2. Komponen Kas di Kas Daerah mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp449.295.001.655,61 atau 495,08% yang dapat dijelaskan bahwa Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2024 menurut BKU Kas di Kas Daerah Rp540.047.220.034,96 sedangkan saldo menurut Rekening Koran sebesar Rp540.037.220.034,96 sehingga terdapat selisih Rp10.000.000,00. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan nilai transfer atas belanja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 51.00/04.0/001473/LS/1.03.1.04.2.10.01.0000/PR/12/2024, yang seharusnya ditransfer sebesar Rp287.579.500,00, namun oleh BPD Bali ditransfer sebesar Rp297.579.500,00.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	4.495.970.420,00	(4.495.970.420,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	4.495.970.420,00	(4.495.970.420,00)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp4.495.970.420,00) atau (100,00%) yang dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 atas segala pendapatan yang ada di unit penghasil sebagian besar tidak melalui kas bendahara penerimaan namun di tampung di rekening penampungan. Hal itu dilakukan mengingat sebagian besar pemungutan pendapatan sudah menggunakan aplikasi dan disetor secara non tunai. Terkait rekening penampungan yang merupakan mekanisme perbankan dalam melakukan penampungan sementara atas pendapatan sebelum di limpahkan ke RKUD sesuai surat nomor B.31.900/8585/PAPKD/BPKAD tanggal 24 Desember 2024 hal Pelimpahan Saldo Rekening Penampungan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan B.31.900/8653/PAPKD/BPKAD tanggal 27 Desember 2024 perihal Revisi Atas Surat Nomor B.31.900/8585/PAPKD/BPKAD diatur sebagai berikut:

1. Pelimpahan saldo rekening penampungan penerimaan pendapatan daerah di PT. Bank BPD Bali ke RKUD selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2024. Mekanisme pelimpahan diatur sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Non Tunai pada tanggal 31 Desember 2024:
 - Transaksi sampai dengan pukul 15.00 WITA harus dilimpahkan ke RKUD pada hari yang berkenaan setelah dilakukan rekonsiliasi.
 - Transaksi setelah pukul 15.00 WITA akan dilimpahkan pada hari berikutnya dan diakui sebagai penerimaan pada tanggal 2 Januari 2025.
 - b. Penyesuaian Layanan Penerimaan Tunai pada tanggal 31 Desember 2024:
 - Transaksi penerimaan setelah pukul 15.00 WITA tetap harus disesuaikan tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

- Untuk pembayaran transaksi setelah pukul 15.00 WITA, layanan tunai tetap diperbolehkan dan hasilnya dilimpahkan pada hari berkenaan.
2. Autodebet Rekening Giro Bendahara OPD:
- a. Bank BPD Bali diminta untuk melakukan autodebet terhadap sisa Saldo Giro dan Jasa Giro dari Rekening Giro bendahara OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali ke RKUD Provinsi Bali dengan nomor rekening 010.01.00.00000-1.
 - b. Catatan: Rekening BOS dan rekening BLUD dikecualikan dari mekanisme autodebet ini.

Sehingga per tanggal 31 Desember 2024, atas saldo rekening penampungan yang dilimpahkan pada hari berikutnya dan diakui sebagai penerimaan pada tahun berikutnya. Rincian Daftar Rekening Bendahara Penerimaan terdapat pada **Lampiran 21**.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh Kas di Bendahara Pengeluaran telah disetor ke Kas di Kas Daerah sebelum tahun 2024 berakhir.

Rincian Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran terdapat pada **Lampiran 21**.

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
RS Bali Mandara	11.384.643.832,20	23.106.882.669,81	(11.722.238.837,61)	(50,73)
RS Mata Bali Mandara	22.272.848.565,09	13.955.324.668,78	8.317.523.896,31	59,60
RS Jiwa Provinsi Bali	11.253.136.977,16	9.421.039.081,34	1.832.097.895,82	19,45
UPTD Pengelolaan Air Limbah	11.397.444.299,21	4.803.618.256,49	6.593.826.042,72	137,27
UPTD Pengelolaan Air Minum	3.776.013.806,69	4.820.767.557,36	(1.044.753.750,67)	(21,67)
UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	7.302.650.158,45	4.199.692.447,04	3.102.957.711,41	73,89
UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	5.493.460.321,60	2.215.539.343,00	3.277.920.978,60	147,95
UPTD Laboratorium Kesehatan	2.591.826.952,86	3.266.828.045,70	(675.001.092,84)	(20,66)
Jumlah	75.472.024.913,26	65.789.692.069,52	9.682.332.843,74	14,72

Tabel di atas menunjukkan Kas di BLUD per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp9.682.332.843,74 atau 14,72%. Penjelasan saldo Kas di BLUD beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Saldo tersebut merupakan Kas di BLUD Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2024 telah diaudit oleh kantor akuntan publik sebagai berikut:
 - a. RSUD Bali Mandara oleh Kantor Akuntan Publik Ketut Budiarta dan Anggiriawan dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00026/2.1266/AU.5/11/1612-1/1/IV/2025 Tanggal 2 April 2025 dengan opini Wajar;
 - b. Rumah Sakit Jiwa oleh Kantor Akuntan Publik Ketut Budiarta dan Anggiriawan dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00024/2.1266/AU.5/11/1612-2/1/IV/2025 Tanggal 9 April 2025 dengan opini Wajar;
 - c. RS Mata Bali Mandara oleh Kantor Akuntan Publik Ketut Budiarta dan Anggiriawan dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00027/2.1266/AU.5/11/1612-1/1/IV/2025 Tanggal 10 April 2025 dengan opini Wajar;
 - d. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat oleh Kantor Akuntan Publik I Gede Oka dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00009/2.1274/AU.5/11/0463.3/1/II/2025 Tanggal 27 Februari 2025 dengan opini Wajar;
 - e. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan oleh Kantor Akuntan Publik I Gede Oka dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00025/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2025 Tanggal 19 Maret 2025 dengan opini Wajar;
 - f. UPTD Pengelolaan Air Limbah oleh Kantor Akuntan Publik I Gede Oka dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00013/2.1274/AU.5/11/0463-4/1/III/2025 Tanggal 4 Maret 2025 dengan opini Wajar;
 - g. UPTD Pengelolaan Air Minum: Kantor Akuntan Publik I Gede Oka dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00005/2.1274/AU.5/11/0463-4/1/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 dengan opini Wajar;
 - h. UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia oleh Kantor Akuntan Publik I Gede Oka dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00016/2.1274/AU.5/11/0463-3/1/III/2025 Tanggal 10 Maret 2025 dengan opini Wajar.

1. Rincian perhitungan saldo Kas di BLUD diuraikan sebagai berikut:

No.	Perangkat Daerah	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Transfer ke Kasda	Saldo Akhir
1	BLUD RS Bali Mandara	23.106.882.669,81	157.555.439.214,93	169.277.678.052,54	0,00	11.384.643.832,20
2	BLUD RS Mata Bali Mandara	13.955.324.668,78	96.573.894.905,74	88.256.371.009,43	0,00	22.272.848.565,09
3	BLUD RS Jiwa	9.421.039.081,34	24.609.637.766,95	22.777.539.871,13	0,00	11.253.136.977,16
4	BLUD UPTD. Pengelolaan Air Limbah	4.803.618.256,49	15.817.028.540,72	9.223.202.498,00	0,00	11.397.444.299,21
5	BLUD UPTD. Pengelolaan Air Minum	4.820.767.557,36	32.318.782.077,33	33.363.535.828,00	0,00	3.776.013.806,69
6	BLUD UPTD. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	4.199.692.447,04	23.351.994.407,41	20.249.036.696,00	0,00	7.302.650.158,45

No.	Perangkat Daerah	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Transfer ke Kasda	Saldo Akhir
7	BLUD UPTD. Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	2.215.539.343,00	3.642.857.935,86	3.266.570.326,00	0,00	2.591.826.952,86
8	BLUD UPTD. Laboratorium Kesehatan	3.266.828.045,70	5.567.206.612,40	3.340.574.336,50	0,00	5.493.460.321,60

2. Rincian posisi saldo Kas di BLUD pada masing-masing rekening bank dapat dijabarkan sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Nama Bank	Nomor Rekening	Saldo Bank
BLUD RS Bali Mandara	Bank BPD Bali	010.01.05.01677-1	167.382.221,13
	Bank Mandiri	145-00-6669000-5	8.428.854.422,30
	Bank BRI	036801002471304	2.239.472.320,77
	Bank BNI	0652074797	471.932.245,00
	Kas Tunai Bendahara Penerimaan		77.002.623,00
	Total Saldo		11.384.643.832,20
BLUD RS Mata Bali Mandara	Bank BPD Bali	010.01.05.02691-1	12.863.619.699,29
	Bank Mandiri	145-00-6005600-5	9.409.228.865,80
	Total Saldo		22.272.848.565,09
BLUD RS Jiwa Provinsi Bali	Bank BPD Bali	020.01.05.00146-9	10.380.970.890,83
	Bank Mandiri	145-00-1297540-1	872.166.086,33
	Total Saldo		11.253.136.977,16
BLUD UPT Pengelolaan Air Limbah	Bank BPD Bali	010.01.05.01672-7	11.397.444.299,21
BLUD UPT Pengelolaan Air Minum	Bank BPD Bali	010.05.01677-2	3.776.013.806,69
BLUD UPTD. Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	Bank BPD Bali	010.01.05.00084-9	2.591.826.952,86
BLUD UPTD. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Bank BPD Bali	010.01.05.00081-3	7.302.650.158,45
BLUD UPTD Balai Laboratorium Kesehatan	Bank BPD Bali	010.01.05.00085-0	5.493.460.321,60

5.3.1.1.1.5 Kas Dana BOS

Saldo Kas Dana BOS yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas Dana BOS	0,00	7.933.065.066,71	(7.933.065.066,71)	(100,00)
Jumlah	0,00	7.933.065.066,71	(7.933.065.066,71)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Kas Dana BOS per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp7.933.065.066,71) atau (100,00%). Penjelasan saldo Kas Dana BOS beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kas Dana Bos mengalami perubahan istilah yang digunakan untuk menyebut Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
2. Perubahan nomenklatur tersebut menyebabkan penyajian yang menurun secara signifikan pada tahun anggaran 2024.

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas Lainnya	3.056.472.412,70	161.634.041,00	2.894.838.371,70	1.790,98
Jumlah	3.056.472.412,70	161.634.041,00	2.894.838.371,70	1.790,98

Tabel di atas menunjukkan Kas Lainnya per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp2.894.838.371,70 atau 1.790,98%. Saldo tersebut merupakan Koreksi SiLPA BOSP TA 2019 s.d. TA 2022.

5.3.1.1.1.7 Kas Dana BOSP

Saldo Kas Dana BOSP yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas Dana BOSP	5.156.741.842,40	0,00	5.156.741.842,40	100,00
Jumlah	5.156.741.842,40	0,00	5.156.741.842,40	100,00

Tabel di atas menunjukkan Kas Dana BOSP per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp5.156.741.842,40 atau 100,00%. Penjelasan saldo Kas Dana BOSP beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Kas Dana BOSP mengalami saldo baru sebesar Rp5.156.741.842,40 atau 100,00%. dikarenakan adanya perubahan nomenklatur rekening sesuai dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rincian mutasi Kas Dana BOSP dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	126.767.000,00	126.767.000,00	0,00	0,00
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	247.395.000,00	277.695.000,00	(30.300.000,00)	(10,91)
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	49.049.509.849,04	51.369.828.554,00	(2.320.318.704,96)	(4,52)
Piutang Pajak Air Permukaan	415.138.682,00	376.917.433,00	38.221.249,00	10,14
Jumlah	49.838.810.531,04	52.151.207.987,00	(2.312.397.455,96)	(4,43)

Tabel di atas menunjukkan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp2.312.397.455,96) atau (4,43%). Penjelasan saldo Piutang Pajak Daerah beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan	9.763.200,00	9.763.200,00	0,00	0,00
Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep	8.985.400,00	8.985.400,00	0,00	0,00
Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus	54.361.600,00	54.361.600,00	0,00	0,00
Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus	13.093.600,00	13.093.600,00	0,00	0,00
Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	6.566.700,00	6.566.700,00	0,00	0,00
Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	16.107.200,00	16.107.200,00	0,00	0,00
Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	17.889.300,00	17.889.300,00	0,00	0,00
Jumlah	126.767.000,00	126.767.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.3.1.1.2.2 Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Saldo Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	65.400.000,00	65.400.000,00	0,00	0,00
Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	55.730.000,00	55.730.000,00	0,00	0,00
Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00
Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	0,00	30.300.000,00	(30.300.000,00)	(100,00)
Piutang BBNKB-Sepeda Motor Roda Dua	124.605.000,00	124.605.000,00	0,00	0,00
Jumlah	247.395.000,00	277.695.000,00	(30.300.000,00)	(10,91)

Tabel di atas menunjukkan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp30.300.000,00) atau (10,91%). Pengurangan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena adanya penghapusan piutang sebesar Rp30.300.000,00 sesuai Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 974/04-E/HK/2024 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Atas Nama Sholehan.

5.3.1.1.2.3 Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Saldo Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar	7.502.811.151,04	9.193.315.867,00	(1.690.504.715,96)	(18,39)
Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya	41.546.698.698,00	42.176.512.687,00	(629.813.989,00)	(1,49)
Jumlah	49.049.509.849,04	51.369.828.554,00	(2.320.318.704,96)	(4,52)

Tabel di atas menunjukkan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp2.320.318.704,96) atau (4,52%). Penambahan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) karena hasil penetapan pajak sebesar Rp49.049.509.849,04 dan pengurangan Piutang Pajak karena adanya pembayaran sebesar Rp51.369.828.554,00.

5.3.1.1.2.4 Piutang Pajak Air Permukaan

Saldo Piutang Pajak Air Permukaan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Pajak Air Permukaan	415.138.682,00	376.917.433,00	38.221.249,00	10,14
Jumlah	415.138.682,00	376.917.433,00	38.221.249,00	10,14

Tabel di atas menunjukkan Piutang Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp38.221.249,00 atau 10,14%. Penambahan Piutang Pajak Air Minum karena hasil penetapan pajak sebesar Rp415.138.682,00 dan pengurangan Piutang Pajak karena adanya pembayaran sebesar Rp376.917.433,00.

Rincian mutasi Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

5.3.1.1.3 Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Retribusi Jasa Umum	29.539.543.742,75	0,00	29.539.543.742,75	100,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha	851.476.404.113,68	148.935.000,00	851.327.469.113,68	571.610,08
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	7.525.000,00	7.525.000,00	0,00	0,00
Jumlah	881.023.472.856,43	156.460.000,00	880.867.012.856,43	562.998,22

Tabel di atas menunjukkan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp880.867.012.856,43 atau 562.998,22%. Penjelasan saldo Piutang Retribusi Daerah beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Rincian mutasi Piutang Retribusi Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

5.3.1.1.3.1 Piutang Retribusi Jasa Umum

Saldo Piutang Retribusi Jasa Umum yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	27.174.768.742,75	0,00	27.174.768.742,75	100,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan	2.364.775.000,00	0,00	2.364.775.000,00	100,00
Jumlah	29.539.543.742,75	0,00	29.539.543.742,75	100,00

Tabel di atas menunjukkan Piutang Retribusi Jasa Umum per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp29.539.543.742,75 atau 0,00%. Penjelasan saldo Piutang Retribusi Jasa Umum beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan mengalami saldo baru sebesar Rp27.174.768.742,75 atau 100,00%.
2. Komponen Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan mengalami saldo baru sebesar Rp2.364.775.000,00 atau 100,00%.

5.3.1.1.3.2 Piutang Retribusi Jasa Usaha

Saldo Piutang Retribusi Jasa Usaha yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	147.635.000,00	148.935.000,00	(1.300.000,00)	(0,87)
Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	851.328.769.113,68	0,00	851.328.769.113,68	100,00
Jumlah	851.476.404.113,68	148.935.000,00	851.327.469.113,68	571.610,08

Tabel di atas menunjukkan Piutang Retribusi Jasa Usaha per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp851.327.469.113,68 atau 571.610,08%. Penjelasan saldo Piutang Retribusi Jasa Usaha beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Piutang Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa piutang sewa sebagian tanah dan gedung Eks BLPP Denpasar dengan Focus Caribbean College. Focus Caribbean College belum membayar sewa yang seharusnya dilunasi paling lambat tanggal 28 Februari 2021, karena adanya pandemi Covid-19 sebesar Rp147.635.000,00
2. Komponen Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah mengalami saldo baru sebesar Rp850.612.415.108,68 atau 100,00% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Komponen Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp850.610.949.524,68 yang berada pada Akun Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah merupakan akun yang baru ditambahkan dalam Bagan Akun Standar Per Semester 2 TA 2024 sesuai dengan pemutakhiran aplikasi SIPD RI yang diatur penggunaannya melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga semua pencatatan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikelola oleh BPKAD seperti Sewa Rumah Dinas, Sewa Kantin, dan Sewa Tanah serta Kerjasama Pemanfaatan dicatat pada akun Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah beserta dengan piutang terkait. Perubahan nomenklatur tersebut menyebabkan peningkatan penyajian yang signifikan pada akun Piutang Retribusi Jasa Usaha. BPKAD Provinsi Bali menetapkan Berita Acara Reklasifikasi Nomor B.31.900.1.6.3/7770/Set/BPKAD tanggal 29 November 2024 sebagai dasar pencatatan perubahan nomenklatur.
 - Piutang penggunaan lahan parkir pada Dinas Kesehatan sebesar Rp980.784,00
 - Piutang Sewa kantin pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp484.800,00
 - Piutang PT Narendra Interpacific Indonesia (NII) per 31 Desember 2023 sebesar Rp843.666.096.797,83. Piutang tersebut terdiri dari:
 - 1) Piutang atas kontribusi tetap Triwulan II, III, dan IV TA 2022 sebesar Rp6.861.546.058,20 yaitu tagihan pokok sebesar Rp6.370.213.776,83; dan
 - 2) Piutang atas kontribusi tetap sesuai Perjanjian Kerja Sama baru Nomor 10 tanggal 23 Desember 2022 sebesar Rp837.295.883.021,00 untuk masa 16 tahun 5 bulan sejak 1 Januari 2023 s.d 30 Mei 2039.

Sesuai Surat Direktur PT NII Nomor 040/NII.DIR-Pemprov/IX/2023 tanggal 1 September 2023 kepada Gubernur Bali perihal tanggapan atas surat Gubernur Nomor B.13.032/2457/UPTD.PBMD/BPKAD. Hasil penelusuran

surat tersebut diketahui bahwa saat ini PT NII sedang dalam proses hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tertanggal 29 Agustus 2023. Berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa terhadap utang yang sudah ada sebelum proses PKPU tidak diperbolehkan untuk dilakukan pembayaran selama berlangsungnya proses PKPU, yang menyebabkan PT NII untuk sementara waktu tidak dapat memenuhi kewajiban kepada Pemerintah Provinsi Bali. Adanya kontribusi tambahan, kontribusi tetap, kontribusi pembagian keuntungan, kontribusi pembagian keuntungan pihak ketiga, dan kontribusi pembagian keuntungan tambahan yang belum dapat dihitung karena UPTD BMD BPKAD belum menerima Laporan Keuangan PT NII dan data pengalihan unit Tahun 2023 sebagai dasar menghitung kontribusi pembagian keuntungan, kontribusi pembagian keuntungan pihak ketiga dan kontribusi pembagian keuntungan tambahan. Sehingga Pemerintah Provinsi Bali tidak dapat menyajikan Piutang dan tidak dapat melakukan penagihan. Lalu pada tahun 2024 Melalui surat BPKAD Provinsi Bali Nomor: B.13.032/1304/UPTD.PBMD/BPKAD, tanggal: 11 Juni 2024, Pemerintah Provinsi Bali kembali mengingatkan PT. NII untuk melakukan Pembayaran Tagihan Triwulan II-IV tahun 2022 dan Pembayaran 1 tahun Kerjasama pemanfaatan Kawasan lot s5 Nusa Dua. Selain itu, sebagai Upaya penagihan Pemerintah Provinsi Bali melalui Surat BPKAD Provinsi Bali, Nomor: B.31.000.2.3.2/2853/UPTD.PBMD/BPKAD, juga memohon laporan keuangan/pendapatan tahun 2023 kepada PT NII, lalu dibalas oleh PT NII dengan mengirimkan surat balasan, namun yang dikirimkan hanya sebatas neraca bukan laporan keuangan yang telah di audit. Selain laporan keuangan, PT NII dalam surat balasannya juga menyebutkan jika ada suatu perusahaan baru yang menggantikan kedudukan PT NII untuk membayar piutangnya yaitu PT Bali Destinasi Lestari (BDL), PT BDL ini lahir dari perjanjian perdamaian yang merupakan hasil dari PKPU

5.3.1.1.3.3 Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Saldo Piutang Retribusi Perizinan Tertentu yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan	7.525.000,00	7.525.000,00	0,00	0,00
Jumlah	7.525.000,00	7.525.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Piutang Retribusi Perizinan Tertentu beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan bahwa Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp7.525.000,00, merupakan Piutang dari Tahun 2015 yang terjadi karena dalam rentang waktu 1 April 2015-10 Juni 2015 belum menerapkan Perda Nomor 2 Tahun 2015. Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2015, Retribusi Izin Perikanan mengalami pengembangan objek pemungutan yaitu SIPI dan penghapusan dua objek yaitu SIUP dan Tanda Pendaftaran Kembali SIUP. Perda baru yaitu Perda Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2015 berlaku mulai tanggal diundangkan 1 April 2015 namun baru diterima tanggal 10 Juni 2015 sehingga dalam kurun waktu 1 April 2015 - 10 Juni 2015 masih menggunakan tarif lama.

5.3.1.1.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	851.314.067.465,83	(851.314.067.465,83)	(100,00)
Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	400.000.000,00	(400.000.000,00)	(100,00)
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	0,00	10.570.000,00	(10.570.000,00)	(100,00)
Piutang Pendapatan BLUD	2.796.271.075,00	28.763.612.818,75	(25.967.341.743,75)	(90,28)
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	491.332.281,37	491.332.281,37	0,00	0,00
Jumlah	3.287.603.356,37	880.979.582.565,95	(877.691.979.209,58)	(99,63)

Tabel di atas menunjukkan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp877.691.979.209,58) atau (99,63%). Penjelasan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.1.4.1 Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Hasil Sewa BMD	0,00	7.647.970.668,00	(7.647.970.668,00)	(100,00)
Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	843.666.096.797,83	(843.666.096.797,83)	(100,00)
Jumlah	0,00	851.314.067.465,83	(851.314.067.465,83)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp851.314.067.465,83) atau (100,00%). Komponen Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp851.314.067.465,83) atau (100,00%);

5.3.1.1.4.2 Piutang Hasil Kerja Sama Daerah

Saldo Piutang Hasil Kerja Sama Daerah yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	400.000.000,00	(400.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	400.000.000,00	(400.000.000,00)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp400.000.000,00) atau (100,00%). Komponen Piutang Hasil Kerja Sama Daerah mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp400.000.000,00) atau (100,00%) yang dapat dijelaskan bahwa Piutang Hasil Kerja Sama Daerah sebesar Rp400.000.000,00 merupakan piutang yang timbul karena adanya Perjanjian Kerja Sama antara UPTD. Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai Provinsi Bali

dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development (ITDC) tentang Pembangunan Strategis yang tidak dapat dihindari berupa pemanfaatan Kawasan Tahura Ngurah Rai untuk Lagoon dan Sustainable Utilities Center yang pada tahun 2024 sudah dilakukan pelunasan piutang

5.3.1.1.4.3 Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Saldo Piutang Pendapatan dari Pengembalian yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	10.570.000,00	(10.570.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	10.570.000,00	(10.570.000,00)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Piutang Pendapatan dari Pengembalian per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp10.570.000,00) atau (100,00%). Komponen Piutang Pendapatan dari Pengembalian mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp10.570.000,00) atau (100,00%) yang dapat dijelaskan bahwa Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp10.570.000,00 merupakan piutang yang timbul karena adanya kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas luar daerah tahun 2023 pada UPTD PAM dan telah dilakukan pengembalian di tahun 2024;

5.3.1.1.4.4 Piutang Pendapatan BLUD

Saldo Piutang Pendapatan BLUD yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Pendapatan BLUD	0,00	28.763.612.818,75	(28.763.612.818,75)	(100,00)
Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.796.271.075,00	0,00	2.796.271.075,00	100,00
Jumlah	2.796.271.075,00	28.763.612.818,75	(25.967.341.743,75)	(90,28)

Tabel di atas menunjukkan Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp25.967.341.743,75) atau (90,28%). Komponen Piutang Pendapatan BLUD mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp25.967.341.743,75) atau (90,28%). Hal ini disebabkan karena adanya reklasifikasi Piutang Pendapatan BLUD ke Piutang Retribusi Daerah;

5.3.1.1.4.5 Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Saldo Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	491.332.281,37	491.332.281,37	0,00	0,00
Jumlah	491.332.281,37	491.332.281,37	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah merupakan denda atas penunggakan pembayaran kontribusi tetap PT Narendra Interpacific (NII) pada triwulan II, III, dan IV tahun 2022 sebesar Rp491.332.281,37.

5.3.1.1.5 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.709.104.636,00	3.727.104.636,00	(18.000.000,00)	(0,48)
Uang Muka	0,00	15.670.313.947,00	(15.670.313.947,00)	(100,00)
Jumlah	3.709.104.636,00	19.397.418.583,00	(15.688.313.947,00)	(80,88)

Tabel di atas menunjukkan Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp15.688.313.947,00) atau (80,88%). Penjelasan saldo Piutang Lainnya beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Rincian mutasi Piutang Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

5.3.1.1.5.1 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	3.709.104.636,00	3.727.104.636,00	(18.000.000,00)	(0,48)
Jumlah	3.709.104.636,00	3.727.104.636,00	(18.000.000,00)	(0,48)

Tabel di atas menunjukkan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp18.000.000,00) atau (0,48%). Komponen Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah mengalami penurunan sebesar (Rp18.000.000,00) dari tahun 2023 karena telah dibayarkan sebesar Rp18.000.000,00;

5.3.1.1.5.2 Uang Muka

Saldo Uang Muka yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	0,00	15.670.313.947,00	(15.670.313.947,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	15.670.313.947,00	(15.670.313.947,00)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Uang Muka per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp15.670.313.947,00) atau (100,00%). Komponen Uang Muka mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp15.670.313.947,00) atau (100,00%) yang dapat dijelaskan bahwa adanya pelunasan sebesar Rp15.670.313.947,00.

5.3.1.1.6 Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penyisihan Piutang Pendapatan	(858.482.180.660,38)	(437.681.086.131,84)	(420.801.094.528,54)	96,14
Penyisihan Piutang Lainnya	(3.709.104.636,00)	(3.805.456.205,74)	96.351.569,74	(2,53)
Jumlah	(862.191.285.296,38)	(441.486.542.337,58)	(420.704.742.958,80)	95,29

Tabel di atas menunjukkan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp420.704.742.958,80 atau 95,29%. Rincian mutasi Penyisihan Piutang dapat dilihat pada **Lampiran 23**. Penjelasan saldo Penyisihan Piutang beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.1.6.1 Penyisihan Piutang Pendapatan

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(621.485.242,76)	(483.147.529,94)	(138.337.712,82)	28,63
Penyisihan Piutang Retribusi	(857.298.578.937,07)	(155.166.500,00)	(857.143.412.437,07)	552.402,36
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(562.116.480,55)	(437.042.772.101,90)	436.480.655.621,35	(99,87)
Jumlah	(858.482.180.660,38)	(437.681.086.131,84)	(420.801.094.528,54)	96,14

Tabel di atas menunjukkan Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp420.801.094.528,54 atau 96,14%. Penjelasan saldo Penyisihan Piutang Pendapatan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Penyisihan Piutang Retribusi mengalami kenaikan signifikan sebesar (Rp857.143.412.437,07) atau 552.402,36%;
2. Komponen Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan signifikan sebesar Rp436.480.655.621,35 atau (99,87%).

5.3.1.1.6.2 Penyisihan Piutang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(3.709.104.636,00)	(3.727.104.636,00)	18.000.000,00	(0,48)
Penyisihan Uang Muka	0,00	(78.351.569,74)	78.351.569,74	(100,00)
Jumlah	(3.709.104.636,00)	(3.805.456.205,74)	96.351.569,74	(2,53)

Tabel di atas menunjukkan Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp96.351.569,74) atau (2,53%).

5.3.1.1.7 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Dibayar Dimuka	400,00	471.686.083,46	(471.685.683,46)	(100,00)
Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah	490.725.885,24	0,00	490.725.885,24	100,00
Jumlah	490.726.285,24	471.686.083,46	19.040.201,78	4,04

Tabel di atas menunjukkan Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp19.040.201,78 atau 4,04%.

Rincian mutasi Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

5.3.1.1.7.1 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Dibayar Dimuka	400,00	471.686.083,46	(471.685.683,46)	(100,00)
Jumlah	400,00	471.686.083,46	(471.685.683,46)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp471.646.083,46) atau (99,99%). Penjelasan saldo Beban Dibayar Dimuka beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan pemutakhiran Bagan Akun Standar SIPD RI pada tahun 2024, akun Beban Dibayar di Muka dirinci lebih detail, sehingga akun lama tidak lagi digunakan. Hal ini berdampak pada penurunan signifikan dalam penyajian saldo akun terkait;
2. Terdapat kelebihan pembayaran belanja obat pada Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebesar Rp400,00, nilai tersebut telah dikembalikan ke Kas di BLUD.

5.3.1.1.7.2 Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah

Saldo Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Peralatan dan Mesin	157.694.163,93	0,00	157.694.163,93	100,00
Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Gedung dan Bangunan	333.031.721,31	0,00	333.031.721,31	100,00
Jumlah	490.725.885,24	0,00	490.725.885,24	0,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp490.725.885,24 atau 100,00%. Penjelasan saldo Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Akun ini merupakan akun baru sejalan dengan pemutakhiran rincian detail akun Beban Dibayar Dimuka. Saldo tersebut berasal dari pembayaran premi asuransi Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya berupa Belanja Asuransi Barang Milik Daerah (Belanja Premi) Pemerintah Provinsi Bali Nomor B.31.000.3.3/1284/UPTD.PBMD/BPKAD dan 200/PKS-M/PDB-ASM/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 antara Pemerintah Provinsi Bali dan PT Asuransi Sinar Mas. Masa pertanggungan berlaku selama 11 Juni 2024 sampai dengan 11 Juni 2025, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Asuransi Gedung Kantor sebanyak 41 Unit dengan total premi sebesar Rp752.405.000,00.
 - b. Asuransi Kendaraan Bermotor sebanyak 98 Unit dengan total premi sebesar Rp356.272.000,00.
 - c. Total premi yang dibayarkan sebesar Rp1.108.677.000,00.
2. Sampai dengan 31 Desember 2024, jumlah hari pemakaian asuransi telah berlangsung selama 204 hari dari total 366 hari masa pertanggungan sehingga bagian premi yang telah dibebankan sebagai beban sebesar Rp617.951.114,76, sedangkan sisanya sebesar Rp490.725.885,24 masih dicatat sebagai Beban Dibayar Dimuka.

5.3.1.1.8 Persediaan

Saldo Persediaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Barang Pakai Habis	163.409.206.924,14	141.743.368.069,26	21.665.838.854,88	15,29
Barang Tak Habis Pakai	115.638.930,60	117.386.070,60	(1.747.140,00)	(1,49)
Jumlah	163.524.845.854,74	141.860.754.139,86	21.664.091.714,88	15,27

Tabel di atas menunjukkan Persediaan per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp21.664.091.714,88 atau 15,27%. Persediaan yang disajikan telah berdasarkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh entitas pada akhir tahun yang didokumentasikan dalam berita acara stock opname. Penjelasan saldo Persediaan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.1.8.1 Barang Pakai Habis

Saldo Barang Pakai Habis yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bahan	33.276.009.681,62	26.310.844.945,54	6.965.164.736,08	26,47
Suku Cadang	100.078.598,67	90.696.863,00	9.381.735,67	10,34
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	16.882.653.748,28	14.408.603.055,36	2.474.050.692,92	17,17
Obat-Obatan	26.621.649.453,73	19.864.729.836,58	6.756.919.617,15	34,01
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	81.611.712.942,31	74.883.864.862,53	6.727.848.079,78	8,98
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	15.388.100,00	(15.388.100,00)	(100,00)
Natura Dan Pakan	467.729.866,85	254.217.505,50	213.512.361,35	83,99
Persediaan Penelitian	2.033.291.122,68	2.371.188.255,75	(337.897.133,07)	(14,25)
Persediaan Dalam Proses	2.416.081.510,00	3.543.834.645,00	(1.127.753.135,00)	(31,82)
Jumlah	163.409.206.924,14	141.743.368.069,26	21.665.838.854,88	15,29

Tabel di atas menunjukkan Barang Pakai Habis per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp21.665.838.854,88 atau 15,29%. Penambahan persediaan diperoleh dari pembelian sebesar Rp253.797.005.866,51, penerimaan hibah barang persediaan sebesar Rp110.499.206.690,44, koreksi catat bertambah persediaan sebesar Rp1.848.837.426,65. Pengurangan persediaan disebabkan karena adanya pemakaian persediaan sebesar Rp321.849.784.279,43, pemberian hibah barang persediaan sebesar Rp17.930.008.786,00, persediaan kadaluarsa/rusak sebesar Rp1.433.713.050,94. Persediaan yang disajikan telah berdasarkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh entitas pada akhir tahun yang didokumentasikan dalam berita acara stock opname. Rincian persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

DAFTAR PERSEDIAAN KADALUARSA		
1	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI	
	Bahan-bahan lainnya	1.827.030,00
	Persediaan untuk diserahkan ke masyarakat	1.241.948.438,90
2	RUMAH SAKIT BALI MANDARA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI	
	Bahan Lainnya	32.369.738,87
	Obat-obatan	80.736.280,56
3	RUMAH SAKIT JIWA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI	
	Bahan Kimia	8.074.806,00
	Bahan-bahan lainnya	17.217.498,75
	Obat-obatan	29.920.901,96
Persediaan Barang Kuasi		
4	Disdikpora	
	Materai 3000	75.050,26
	Materai 6000	1.458.000,00
5	Bappeda	
	Materai 3000	1.071.000,00
	Materai 6000	4.464.000,00
Jumlah		1.419.162.745,30

5.3.1.1.8.2 Barang Tak Habis Pakai

Saldo Barang Tak Habis Pakai yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Komponen	115.638.930,60	117.386.070,60	(1.747.140,00)	(1,49)
Jumlah	115.638.930,60	117.386.070,60	(1.747.140,00)	(1,49)

Tabel di atas menunjukkan Barang Tak Habis Pakai per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp1.747.140,00) atau (1,49%) yang disebabkan karena adanya pemakaian persediaan sebesar Rp1.747.140,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali. Persediaan yang disajikan telah berdasarkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh entitas pada akhir tahun yang didokumentasikan dalam berita acara stock opname. Rincian Persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Investasi Jangka Panjang Permanen	6.915.708.269.354,89	6.851.124.152.537,51	64.584.116.817,38	0,94
Jumlah	6.915.708.269.354,89	6.851.124.152.537,51	64.584.116.817,38	0,94

Tabel di atas menunjukkan Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp64.584.116.817,38 atau 0,94%. Penjelasan saldo Investasi Jangka Panjang beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penyertaan Modal	6.915.708.269.354,89	6.851.124.152.537,51	64.584.116.817,38	0,94
Jumlah	6.915.708.269.354,89	6.851.124.152.537,51	64.584.116.817,38	0,94

Tabel di atas menunjukkan Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp64.584.116.817,38 atau 0,94%. Penjelasan saldo Investasi Jangka Panjang Permanen beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.2.1.1 Penyertaan Modal

Saldo Penyertaan Modal yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.771.706.852.508,99	6.707.028.698.055,35	64.678.154.453,64	0,96
1. Penyertaan Modal kepada BUMD				
a. Perumda Kerta Bali Saguna	95.859.986.587,50	101.999.149.613,50	(6.139.163.026,00)	(6,02)
b. PT. BPD Bali	1.464.824.031.618,88	1.400.904.637.647,77	63.919.393.971,11	4,56
c. PT. Jamkrida Bali Mandara	203.432.294.659,34	191.441.956.249,81	11.990.338.409,53	6,26

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
d. Perseroda Pusat Kebudayaan Bali	5.004.744.704.585,27	5.004.744.704.585,27	0,00	0,00
e. Perumda Kerthi Bali Santhi	2.845.835.058,00	7.938.249.959,00	(5.092.414.901,00)	(64,15)
Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	144.001.416.845,90	144.095.454.482,16	(94.037.636,26)	(0,07)
2. Penyertaan Modal kepada BUMN				
a. PT Rumah Sakit Puri Raharja	42.851.416.845,90	42.945.454.482,16	(94.037.636,26)	(0,22)
b. PT Asuransi Bangun Askrida	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	0,00
c. PT Jasa Marga Bali Tol	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	6.915.708.269.354,89	6.851.124.152.537,51	64.584.116.817,38	0,94

Tabel di atas menunjukkan Penyertaan Modal per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp64.584.116.817,38 atau 0,94%. Penjelasan saldo Penyertaan Modal beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pernyataan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

a. Perumda Kerta Bali Saguna

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Perumda Kerta Bali Saguna	95.859.986.587,50	101.999.149.613,50	(6.139.163.026,00)	(6,02)

Pada tahun 2022, terjadi perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna. Perubahan bentuk badan hukum ini dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan perekonomian yang sehat, kuat, produktif, dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia sesuai Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Bidang usaha dan jenis usaha Perumda Kerta Bali Saguna meliputi Pengelolaan Aset dan Infrastruktur serta jasa, Industri dan Perdagangan, dan Energi dan Ketenagalistrikan. Laporan Keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan dengan Laporan Auditor Independen Nomor. 00049/3.0225/AU.2/05/1756-2/1/V/2025 Tanggal 7 Mei 2025 dan mendapat opini Wajar. Nilai penyertaan modal pada Perumda Kerta Bali Saguna disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada Perusahaan Daerah sebesar 100,00%. Berikut perhitungan nilai penyertaan modal pada Perumda Kerta Bali Saguna Tahun 2024:

Modal Disetor	5.282.769.658,00
Akumulasi Laba/(Rugi) s.d. Tahun Lalu Bagian PemProv. Bali	96.716.379.955,50
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	68.860.836.974,00
Deviden yang Dibagikan atas Laba Tahun Buku 2022	(75.000.000.000,00)
Jumlah	95.859.986.587,50

b. PT. BPD Bali

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
PT. BPD Bali	1.464.824.031.618,88	1.400.904.637.647,77	63.919.393.971,11	4,56

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Bank) didirikan berdasarkan akta No. 131 tanggal 5 Juni 1962. Perubahan badan hukum Bank ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Bali dari PD menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Bali (Bank BPD Bali) yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 2002 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 No.6 Seri D No.3). Penyesuaian bentuk badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam akta notaris No. 7 tanggal 12 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H. Notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H. Ruang lingkup kegiatan Bank BPD Bali meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Memberikan kredit
- 3) Menerbitkan surat pengakuan utang;
- 4) Menempatkan dana, meminjam dana, dari/atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- 5) Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nilai penyertaan modal pada PT. BPD Bali disajikan dengan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT. BPD Bali sebesar 29,91%. Laporan Keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo dengan Laporan No/Ref:00002/2.1127/AU.1/07/0060-4/1/1/2025 tanggal 10 Januari 2025 dan mendapatkan Opini Wajar. Nilai penyertaan modal pada PT. BPD Bali Tahun 2024 diperoleh dari perhitungan persentase kepemilikan dari laba PT.BPD Bali Tahun 2024 (audited) dikurangi dengan dividen yang dibagikan atas laba Tahun 2023. Berikut perhitungan nilai penyertaan modal pada PT. BPD Bali Tahun 2024:

Modal Disetor	719.912.000.000,00
Akumulasi Laba/(Rugi) s.d. Tahun Lalu Bagian PemProv. Bali	680.992.637.647,77
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	866.780.043.511,00
Bagian Laba untuk Pemegang Saham Lainnya	(607.526.132.496,86)
Dividen yang Dibagikan atas Laba Tahun Buku 2023	(195.334.517.043,03)
Jumlah	1.464.824.031.618,88

c. PT. Jamkrida Bali Mandara

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
PT. Jamkrida Bali Mandara	203.432.294.659,34	191.441.956.249,81	11.990.338.409,53	6,26

PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 27 tanggal 21 November 2010 Tanggal 20 Oktober 2010. PT. Jamkrida Bali Mandara berusaha dalam bidang Jasa Penjaminan Kredit, memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi serta meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bali melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah berupa uang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali tanggal 8 Agustus 2023. Laporan Keuangan PT. Jamkrida Bali Mandara sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan dengan Laporan No.00004/3.0225/AU.1/09/1756-2/1/II/2025 Tanggal 14 Februari 2025 dan mendapat Opini Wajar. Nilai penyertaan modal PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT. Jamkrida sebesar 90,91%. Penambahan nilai penyertaan modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara tahun 2024 adalah sebesar persentase kepemilikan dari Laba (Rugi) Tahun 2024 sesuai Laporan Laba (Rugi) Audited 2024 dan telah dikurangi nilai deviden yang dibagikan atas Laba Tahun 2023. Berikut perhitungan nilai penyertaan modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara Tahun 2024:

Modal Disetor	174.846.200.000,00
Akumulasi Laba/(Rugi) s.d. Tahun Lalu Bagian PemProv. Bali	23.595.756.249,81
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	7.047.898.712,00
Bagian Laba untuk Pemegang Saham Lainnya	(640.384.901,47)
Dividen yang Dibagikan atas Laba Tahun Buku 2023	(1.417.175.401,00)
Jumlah	203.432.294.659,34

d. Perseroda Pusat Kebudayaan Bali

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Perseroda Pusat Kebudayaan Bali	5.004.744.704.585,27	5.004.744.704.585,27	0,00	0,00

Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali didirikan dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pusat kebudayaan Bali yang berkualitas, inovatif, transparan dan akuntabel. Pengelolaan Pusat Kebudayaan Bali yang bergerak di bidang kegiatan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Bali; Pengembangan Ekonomi; Pengembangan Kawasan; Perdagangan; Olahraga; Pementasan Seni; Pameran Produk Budaya; Pusat Bisnis (*Central Business District/CBD*); Pelabuhan Penyebrangan dan Marina; *Meeting Incentive Convetion and Exhibition* (MICE); Kesehatan; Hunian; Kawasan Pengembangan Berbasis Transit (*Transit Oriented Development/TOD*); dan Wahana Wisata Alam diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali. Pemerintah Provinsi Bali melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroda berupa inbreng atas Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali. Sampai saat ini Perseroda Pusat Kebudayaan Bali belum beroperasi dan belum pernah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik.

e. Perumda Kerthi Bali Santhi

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Perumda Kerthi Bali Santhi	2.845.835.058,00	7.938.249.959,00	(5.092.414.901,00)	(64,15)

Perumda Kerthi Bali Santhi didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2022 Tanggal 2 Maret 2022. Pendirian Perumda Kerthi Bali Santhi dimaksudkan untuk menyelenggarakan Pariwisata Digital Budaya Bali secara professional, akuntabel dan transparan. Laporan Keuangan Perumda Kerthi Bali Santhi diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ketut Budiarta dan Anggiriawan dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00007/2.1266/AU.2/05/1612-2/1/II/2025 tanggal 14 Pebruari 2025 dan mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian. Nilai penyertaan modal pada Perumda Kerthi Bali Santhi disajikan dengan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali sebesar 100%. Berikut perhitungan nilai penyertaan modal pada Perumda Kerthi Bali Santhi Tahun 2024:

Modal Disetor	10.000.000.000,00
Akumulasi Laba/(Rugi) s.d. Tahun Lalu Bagian PemProv. Bali	(2.061.750.041,00)
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	(5.092.414.901,00)
Jumlah	2.845.835.058,00

1. Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

a. PT. Rumah Sakit Puri Raharja

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
PT Rumah Sakit Puri Raharja	42.851.416.845,90	42.945.454.482,16	(94.037.636,26)	(0,22)

PT. Puri Raharja merupakan salah satu rumah sakit swasta yang bergerak dalam kegiatan usaha berupa membangun, mendirikan dan mengelola rumah sakit untuk umum, termasuk di dalamnya klinik Kesehatan Masyarakat dan laboratorium. Nilai penyertaan modal pada PT. Puri Raharja disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT. Puri Raharja sebesar 58,00% dan karena keterbatasan akun, maka Penyertaan Modalnya di catat sebagai Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penambahan nilai penyertaan modal pada PT. Puri Raharja tahun 2024 adalah sebesar persentase kepemilikan dari Laporan Laba (Rugi) Audited 2024 dan telah dikurangi nilai dividen yang dibagikan atas Laba Tahun 2023. Laporan Keuangan PT. Puri Raharja sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik I Gede Oka dengan Laporan No: 00031/2.1274/AU.2/05/0463-4/1/III/2025 Tanggal 27 Maret 2025 dan mendapat Opini Wajar. Berikut perhitungan nilai penyertaan modal pada PT. Puri Raharja Tahun 2024:

Modal Disetor	8.736.000.000,00
Akumulasi Laba/(Rugi) s.d. Tahun Lalu Bagian PemProv. Bali	34.209.454.482,16
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	903.823.349,56
Bagian Laba untuk Pemegang Saham Lainnya	(379.605.806,82)
Dividen yang Dibagikan atas Laba Tahun Buku 2023	(618.255.179,00)
Jumlah	42.851.416.845,90

b. PT Asuransi Bangun Askrida

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
PT Asuransi Bangun Askrida	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	0,00

PT. Asuransi Bangun Askrida (Perseroan) didirikan berdasarkan Akta Notaris Raharti Sudjardjati, S.H., No. 9 dan dengan persetujuan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Pemerintah No. KEP.192/KM.B/1990, tanggal 14 Maret 1990. PT. Asuransi Bangun Askrida merupakan Perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang asuransi umum dan menawarkan perlindungan asuransi atas semua risiko dan kehilangan, khususnya bagi gedung-gedung pemerintahan dan juga asset-asset milik pemerintah lainnya. Nilai penyertaan modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida disajikan dengan menggunakan metode cost, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali sebesar 0,39% dan karena keterbatasan akun, maka Penyertaan Modalnya dicatat sebagai Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Modal Disetor	1.150.000.000,00
Akumulasi Laba/(Rugi) s.d. Tahun Lalu Bagian PemProv. Bali	-
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	130.076.198.387,00
Bagian Laba untuk Pemegang Saham Lainnya	(54.632.003.322,54)

Dividen yang Dibagikan atas Laba Tahun Buku 2022

-

Jumlah

1.150.000.000,00

c. PT Jasa Marga Bali Tol

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
PT Jasa Marga Bali Tol	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	0,00

PT Jasa Marga Bali Tol (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta No. 02 tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU57740.AH.01.01.TH 2011 tanggal 25 Nopember 2011. PT. Jasa Marga Bali Tol berusaha dalam bidang pengusahaan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, yang meliputi pendanaan, perencanaan Teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan telah memperoleh izin melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 375/KPTS/2013 tanggal 18 September 2013, dimana hak konsesi diberikan kepada Perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan konstruksi, operasi dan pemeliharaan atas jalan tol Nusa Dua- Ngurah Rai-Benoa selama 45 tahun, terhitung mulai Bulan Oktober 2013. Nilai Penyertaan Modal pada PT Jasa Marga Bali Tol disajikan dengan menggunakan metode biaya, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT Jasa Marga Bali Tol sebesar 8,01%. Nilai Penyertaan Modal pada PT Jasa Marga Bali Tol yang disajikan sebesar biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 yang dikeluarkan berdasarkan Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah

Modal Disetor	100.000.000.000,00
Akumulasi Laba/(Rugi) s.d. Tahun Lalu Bagian PemProv. Bali	-
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	(1.035.190.756,00)
Bagian Laba untuk Pemegang Saham Lainnya	-
Dividen yang Dibagikan atas Laba Tahun Buku 2022	-
Jumlah	100.000.000.000,00

Rincian Penyertaan Modal dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

5.3.1.3 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tanah	5.385.006.936.615,43	4.907.796.884.852,40	477.210.051.763,03	9,72
Peralatan Dan Mesin	2.196.293.227.099,70	2.046.115.176.574,25	150.178.050.525,45	7,34
Gedung Dan Bangunan	3.850.274.091.822,14	3.208.051.168.977,71	642.222.922.844,43	20,02
Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	4.335.363.075.122,41	3.476.544.508.140,82	858.818.566.981,59	24,70
Aset Tetap Lainnya	98.441.316.502,04	83.879.383.673,69	14.561.932.828,35	17,36
Konstruksi Dalam Pengerjaan	43.173.893.899,00	266.126.280.404,04	(222.952.386.505,04)	(83,78)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan	(5.485.889.248.727,52)	(4.791.938.954.703,30)	(693.950.294.024,22)	14,48
Jumlah	10.422.663.292.333,20	9.196.574.447.919,61	1.226.088.844.413,45	13,33

Tabel di atas menunjukkan Aset Tetap per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp1.226.088.844.413,45 atau 13,33%. Penjelasan saldo Aset Tetap beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.3.1 Tanah

Saldo Tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tanah	5.385.006.936.615,43	4.907.796.884.852,40	477.210.051.763,03	9,72
Jumlah	5.385.006.936.615,43	4.907.796.884.852,40	477.210.051.763,03	9,72

Tabel di atas menunjukkan Tanah per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp477.210.051.763,03 atau 9,72%. Penjelasan saldo Tanah beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Saldo Awal **4.907.796.884.852,40**

Mutasi Tambah

1. Belanja Modal 3.464.184.000,00
2. Penerimaan Hibah 468.471.818.227,00
3. Reklasifikasi dari Aset Lainnya 941.380.000,00
4. Reklasifikasi dari Properti Investasi 1.419.050.000,00
5. Koreksi Pencatatan Saldo Awal 109.543.885.000,00
6. Mutasi antar Perangkat Daerah 187.425.994.745,00

Jumlah Mutasi Tambah **771.266.311.972,00**

Mutasi Kurang:

1. Penghapusan (43.433.500,00)
2. Pengeluaran Hibah (29.957.772.500,00)
3. Reklasifikasi ke Aset Lainnya (10.735.072.500,00)
4. Reklasifikasi ke Properti Investasi (55.925.054.625,00)
5. Koreksi Pencatatan Saldo Awal (9.968.932.338,97)
6. Mutasi antar Perangkat Daerah (187.425.994.745,00)

Jumlah Mutasi Kurang

(294.056.260.208,97)

Saldo Akhir

5.385.006.936.615,43

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

1. Pada Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bali melakukan Belanja Modal Tanah sebesar Rp3.464.184.000,00 tercatat di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali yang digunakan untuk pembelian tanah pembangunan SMAN 1 Banjar di Kabupaten Buleleng senilai Rp3.460.000.000,00 Terdapat juga penerimaan hibah senilai Rp468.471.818.227,00 tercatat di 3 Perangkat Daerah yaitu BPKAD senilai Rp5.668.000.000,00 di Dinas PUPRPERKIM senilai Rp462.331.218.227,00 dan Dinas Pendidikan senilai Rp472.600.000,00.
2. Terdapat Koreksi Saldo Awal bertambah pada BPKAD senilai Rp84.469.075.000,00 yang salah satunya berupa temuan tanah pengelola yang ditemukan oleh UPTD.PBMD senilai Rp21.435.750.000,00 berupa Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan di Kabupaten Badung dan terdapat Koreksi Saldo Awal berkurang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp304.075.000,00 dikarenakan terdapat pencatatan ganda pada BPKAD.
3. Dari saldo tersebut terdapat tanah yang disewakan dan dipinjamkan sebagian dari keseluruhan luasnya, masih tercatat di aset tetap. Daftar tanah yang disewakan dan dipinjamkan sebagian dari keseluruhan luasnya dapat dilihat pada **Lampiran 28**.
4. Sebanyak 583 Bidang Tanah yang belum bersertifikat terdiri dari 83 bidang tercatat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 483 bidang tercatat di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman, 7 bidang tercatat di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Desa, 2 bidang tercatat di Dinas Kelautan Dan Perikanan, dan 1 bidang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pangan, 4 bidang tercatat di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, 1 bidang di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, 1 bidang di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan 1 bidang di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
5. Pemerintah Provinsi Bali memiliki permasalahan terkait dengan Aset Tetap Tanah, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. **Tanah Eks HGU Nomor 1 Desa Pemuteran**, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng seluas 2.465.000 m² (246,5 Ha). Tanah tersebut diklaim oleh PT M selaku pemegang HGU Nomor 1 Desa Pemuteran yang sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, hasil dari Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Oktober 2017, Pemerintah Provinsi Bali menang sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 591PK/Pdt/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 yang sudah *inkracht*. Proses selanjutnya melakukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Singaraja yang difasilitasi oleh Biro Hukum. Pada tanggal 10 Juni 2021 Perbekel Pemuteran telah membentuk tim melalui Keputusan Perbekel Pemuteran No. 140/25/VI/2021 disebut dengan Tim Tiga Belas, selanjutnya Tim tersebut mohon audiensi dengan Gubernur Bali melalui Surat No. 02/TIM PKPT/VII/2021 Tanggal 7 Juli 2021. Permohonan audiensi difasilitasi melalui rapat tanggal 17 Desember 2021 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, dengan hasil :
 - 1) Pemerintah Provinsi Bali bersama Tim Tiga Belas sepakat untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan tanah eks HGU No. 1 / Desa Pemuteran secara damai.
 - 2) Tim Tiga Belas akan segera menyiapkan data masyarakat yang bertempat tinggal dan/atau menggarap tanah tersebut sesuai permintaan Pemerintah Provinsi Bali, dan akan segera menyampaikannya bersama surat permohonan kepada Gubernur Bali;

3) Tim Tiga Belas siap mensosialisasikan kepada masyarakat agar ikut mendukung dan kooperatif jika dilaksanakan pendataan dan pemetaan langsung oleh Pemerintah Provinsi Bali ke tanah tersebut. BPKAD Provinsi Bali telah mendaftarkan permohonan pengukuran dan pemetaan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Pada tanggal 1 November 2022 telah dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama pihak BPN, didapat luas total 2.406.835 m² sesuai Peta Bidang Tanah Nomor 1063/2022 Tanggal 15 Desember 2022. Hasil pengukuran dan pemetaan tersebut sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Gubernur Bali. Tanggal 30 Januari 2023 dilakukan audiensi antara Tim Tigabelas dengan Gubernur Bali, namun belum juga ada kesepakatan mengenai luas lahan yang akan didistribusikan.

Tanggal 27 Agustus 2023 dilaksanakan rapat bertempat di Jaya Sabha antara Gubernur Bali, Pj. Bupati Buleleng, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng dan Perwakilan Tim 13 menyepakati :

1) Menyepakati realokasi tanah eks HGU 1 Pemuteran seluas 85,76 Hektar yang digunakan untuk : Desa Dinas, Desa Adat, Kawasan Pura dan Kuburan, warga penggarap tahun 1963, warga penggarap tahun 1992, TNI (Arhanud), fasilitas umum dan peternakan.

2) Realokasi sebagaimana dimaksud akan dibicarakan lebih lanjut oleh Tim 13 dengan masyarakat yang difasilitasi oleh Pj. Bupati Buleleng, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.

Pada tanggal 3 September 2023 dilaksanakan pertemuan langsung antara Gubernur dengan Tim Tigabelas dan warga penggarap bertempat di Kantor Desa Pemuteran untuk menyampaikan hasil pertemuan tanggal 27 Agustus 2023 (poin 1 di atas) secara langsung kepada warga penggarap. Namun pada hari itu Tim Tigabelas meminta waktu kepada Gubernur untuk mensosialisasikan terlebih dahulu kepada warga penggarap karena pada pertemuan itu tidak semua warga penggarap hadir. Gubernur memberikan waktu paling lambat tanggal 4 September 2023 harus sudah ada jawaban dari Tim Tigabelas atas opsi pemberian lahan seluas 85,76 Hektar kepada warga. Sesuai batas waktu yang diberikan, maka Tim Tigabelas menghadap kepada Gubernur di Jayasabha tanggal 4 September 2023. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati luas tanah yang akan dilepaskan hak oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk didistribusikan kepada warga penggarap, Desa Adat Pemuteran, Desa Dinas Pemuteran, kawasan pura dan kuburan serta fasilitas umum adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari luas hasil ukur terbaru, atau seluas 120,3 Ha. Sedangkan 50% sisanya seluas 120,3 Ha adalah untuk Pemerintah Provinsi Bali termasuk alokasi untuk TNI (Arhanud).

Terhadap kesepakatan tersebut, selanjutnya BPKAD Provinsi Bali melaksanakan rapat pada tanggal 3 Oktober 2023 untuk membahas tindak lanjut penyelesaian permasalahan tanah eks HGU 1, yang bertujuan untuk mendengar secara langsung dari Tim Tigabelas terkait kesepakatan yang telah disetujui bersama Gubernur Bali di Jayasabha. Tim Tigabelas menjelaskan bahwa mereka sudah membuat konsep peta posisi tanah sesuai kesepakatan tanggal 4 September 2023 di Jayasabha. Dalam rapat tersebut juga terdapat usulan dari anggota Kelompok Ahli Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Bali agar dilakukan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 591/PK/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 (Putusan Peninjauan Kembali yang memenangkan Pemerintah Provinsi Bali dalam perkara melawan PT M). Hasil rapat tersebut telah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

Atas laporan hasil rapat tanggal 3 Oktober 2023 tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Bali menugaskan Kepala Biro Hukum untuk membahas terkait usulan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut sehingga pada tanggal 3 November 2023 Biro Hukum melaksanakan rapat bersama Kelompok Ahli Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Bali, BPKAD Provinsi Bali, dan Inspektorat

Daerah Provinsi Bali. Hasil rapat tersebut telah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

- b. Tanah Pemerintah Provinsi Bali SHP Nomor 4 Desa Sidakarya**, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar seluas 3.000 m² (0,3 Ha). Di atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik a.n INSA yang telah dijual dan dijadikan perumahan. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Provinsi Bali menggugat Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan INSA ke Pengadilan Negeri Denpasar, namun gugatan tidak dikabulkan karena Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili jenis perkara ini yang semestinya diajukan ke PTUN Denpasar. Pada tanggal 5 Maret 2021 dilaksanakan rapat bersama Kanwil BPN Provinsi Bali, Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan Kelompok Ahli Bantuan Hukum, dengan hasil bahwa untuk tindak lanjut permasalahan tanah SHP No. 4 Desa Sidakarya, Kota Denpasar, BPKAD Provinsi Bali bersama Biro Hukum Setda Provinsi Bali akan segera berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk meminta data para pemegang sertifikat hak milik yang berada di atas tanah SHP No. 4 Desa Sidakarya sebagai bahan penyusunan gugatan. Hasil rapat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kepala BPKAD Provinsi Bali dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk dapat diberikan data dan informasi yang memuat nama pemegang hak, nomor sertifikat, dan luas bidang tanah/sertifikat yang terbit di atas bidang tanah SHP Nomor 4 / Desa Sidakarya yang akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun upaya hukum penyelesaian permasalahan tanah dimaksud (Surat Nomor B.13.593/1778/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 13 Juni 2022). Sesuai hasil rapat tanggal 16 Januari 2023 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, untuk memenuhi Surat Kepala BPKAD Provinsi Bali tersebut, Kantor Pertanahan Kota Denpasar akan memanggil pihak Pemerintah Provinsi Bali untuk mediasi. Dalam mediasi tersebut akan diuraikan asal-mula tanah SHP Nomor 4 / Sidakarya sampai pada tersebutnya beberapa hak milik di atasnya, serta akan disebutkan nomor dan nama pemegang haknya.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Nomor B.13.032/1287/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 11 Mei 2023) untuk meminta agar segera dilakukan mediasi sesuai hasil rapat tanggal 16 Januari 2023.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar telah mengundang Pemerintah Provinsi Bali untuk mediasi penyelesaian permasalahan akibat indikasi tumpang tindih SHP Nomor 4/Sidakarya pada tanggal 13 Desember 2023. Hasil mediasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor IP.02.02/4051-51.71/XII/2023 Tanggal 21 Desember 2023 yang isinya memberikan daftar nama pemegang hak dan nomor sertipikat/hak yang terbit di atas tanah aset Pemerintah Provinsi Bali SHP 4 Sidakarya.

Kepala BPKAD Provinsi Bali telah menyampaikan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor IP.02.02/4051-51.71/XII/2023 Tanggal 21 Desember 2023 kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali melalui Surat Nomor B.13.045.2/12/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 3 Januari 2024.

Pada tanggal 10 Oktober 2024, Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar membalas surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.13.032/1287/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 11 Mei 2023, dengan Surat Nomor IP.02.02/3592-51.71/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024, yang isinya bahwa dalam rangka tertib administrasi di bidang pertanahan dan guna menjamin kepastian hukum, pihak-pihak yang berkeberatan dipersilakan untuk melakukan upaya hukum berupa gugatan di lembaga peradilan.

c. Berdasarkan Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali, terdapat tanah aset Pemerintah Provinsi Bali yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng seluas 400 m², tercatat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan kode barang/register : 01.01.11.04.01/0001. Dinas Perikanan Darat membeli tanah tersebut dari PGM berdasarkan Padol tanggal 9 Desember 1953, Nomor 174/1953, yang diperkuat dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Ipeda Singaraja Tanggal 2 Februari 1988 Nomor S.083/WPJ.08/KI. (Sumber : Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng Nomor 593/11/Um/93.K. Tanggal 12 Januari 1994). Sejak tanggal 1 Januari 1969, tanah tersebut ditempati dan dihasili oleh I Nengah Saban dari Banjar Banyuasri berdasarkan Surat Perjanjian Mengerjakan Tanah Tanggal 1 Juni 1969. Pada tahun 1991, tanah tersebut dipinjamkan kepada Made Tirtayasa (ipar dari pengelola UD Taman Dewata yang bernama Ketut Arta) untuk lokasi pembibitan tanaman hias. (Sumber : Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng Nomor 593/334/Um/93 Tanggal 12 Januari 1994). Pada tahun 1992, tanah yang sama dijual lagi oleh PG Cs (cucu alm. PGM) kepada KA (Pengelola UD. Taman Dewata) di depan PPAT pada tanggal 3 Desember 1992 dengan Akta Jual-Beli No. : 690/Ket.Bll/98 dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 853 atas nama Ketut Arta. Padahal tanah tersebut akan digunakan untuk perluasan pembangunan 1 (satu) unit kerja / Rumah Jabatan. Pada tanggal 9 Maret 1994 dilakukan pertemuan yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setwilda Tingkat II Buleleng, di mana para pihak akan diupayakan untuk bermusyawarah yang nantinya sebagai dasar penyelesaian masalahnya. Tindak lanjut hasil pertemuan tanggal 6 Juli 1994 yang dilakukan di ruangan Asisten I Setwilda Tk. II Buleleng yaitu :

- 1) Pada pertemuan tersebut telah berhasil dirumuskan bahwa tanah Dinas Perikanan di Jalan A. Yani Singaraja akan diganti dengan tanah milik Pemda Tk. II Buleleng yang berlokasi di sebelah barat Gedung Kesenian (Di belakang Kantor Departemen Keuangan) Singaraja, seluas ± 4 are.
- 2) Setelah pertemuan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan ke lapangan, ternyata tanah yang direncanakan sebagai ganti tersebut point 1 di atas, ada oknum yang menguasainya, di samping itu tanah tersebut bentuknya kecil memanjang.

Dalam upaya tertib pengelolaan tanah aset Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan penelusuran dokumen dan pengecekan lapangan tanggal 29 Mei 2013 ditemukan bahwa:

- 1) Tanah yang lokasinya di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kaliuntu, Buleleng ternyata luasnya bukan 400 m² melainkan 350 m², dengan Sertifikat Hak Milik No. 853 tanggal 22 Februari 1993 atas nama IKA (almarhum) yang dibeli pada tahun 1992 dari cucu PGM (GCS).
- 2) Di atas tanah tersebut sudah didirikan bangunan oleh I Ketut Arta (almarhum) dan disewa oleh perusahaan FIF.

Untuk mengetahui kepastian terbitnya SHM No. 853 dimaksud di atas, BPKAD Provinsi Bali telah mengajukan permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, dan telah dilakukan pengukuran pada tanggal 25 Oktober 2022, didapat hasil ukur 400 m² dengan keterangan berada pada SHM 00853, GS 00011/1993. Hasil ukur tersebut akan dilaporkan kepada Sekda.

Saat ini sedang pengumpulan dokumen pendukung (asli) oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali bersama Biro Hukum Setda Provinsi Bali untuk proses gugatan.

Rincian permasalahan aset tetap tanah dapat dilihat pada **Lampiran 29**.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Besar	70.775.656.218,00	61.407.343.366,00	9.368.312.852,00	15,26
Alat Angkutan	227.033.542.660,00	218.337.938.054,00	8.695.604.606,00	3,98
Alat Bengkel dan Alat Ukur	48.257.085.478,96	44.643.278.145,96	3.613.807.333,00	8,09
Alat Pertanian	14.358.562.267,91	13.428.755.354,91	929.806.913,00	6,92
Alat Kantor dan Rumah Tangga	563.334.659.975,94	512.770.526.746,50	50.564.133.229,44	9,86
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	127.102.008.103,77	122.578.034.121,01	4.523.973.982,76	3,69
Alat Kedokteran dan Kesehatan	504.924.422.110,53	484.261.205.743,53	20.663.216.367,00	4,27
Alat Laboratorium	174.003.467.883,18	165.596.796.606,18	8.406.671.277,00	5,08
Alat Persenjataan	30.021.251.265,10	14.175.448.514,09	15.845.802.751,01	111,78
Komputer	410.241.934.523,25	387.561.035.094,51	22.680.899.428,74	5,85
Alat Eksplorasi	80.536.000,00	17.636.000,00	62.900.000,00	356,66
Alat Pengeboran	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	445.680.100,00	296.680.100,00	149.000.000,00	50,22
Alat Bantu Eksplorasi	32.700.000,00	0,00	32.700.000,00	100,00
Alat Keselamatan Kerja	10.488.852.665,00	7.867.753.212,00	2.621.099.453,00	33,31
Alat Peraga	772.313.100,00	772.313.100,00	0,00	0,00
Peralatan Proses/Produksi	3.964.448.510,00	3.383.413.320,00	581.035.190,00	17,17
Rambu-rambu	3.570.604.549,56	2.828.766.549,56	741.838.000,00	26,22
Peralatan Olahraga	6.820.501.688,50	6.123.252.546,00	697.249.142,50	11,39
Jumlah	2.196.293.227.099,70	2.046.115.176.574,25	150.178.050.525,45	7,34

Tabel di atas menunjukkan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp150.178.050.525,45 atau 7,34%. Penjelasan saldo Peralatan dan Mesin beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Saldo Awal **2.046.115.176.574,25**

Mutasi Tambah

1. Belanja Modal 130.063.180.613,50
2. Kapitalisasi Belanja Non Modal 711.515.274,00
3. Penerimaan Hibah 20.725.755.777,00
4. Reklasifikasi antar Aset Tetap 15.008.074.998,00
5. Koreksi Pencatatan Saldo Awal 21.012.966.353,00
6. Mutasi antar Perangkat Daerah 11.081.689.898,00

Jumlah Mutasi Tambah 198.603.182.913,50

Mutasi Kurang:

1. Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Non-Modal)	(208.129.880,00)
2. Pembayaran Hutang	(3.060.263.152,00)
3. Reklasifikasi antar Aset Tetap	(10.377.819.789,00)
4. Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(20.792.011.872,05)
5. Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(201.530.520,00)
6. Dibawah Kapitalisasi	(2.703.687.277,00)
7. Mutasi antar Perangkat Daerah	(11.081.689.898,00)

Jumlah Mutasi Kurang (48.425.132.388,05)

Saldo Akhir 2.196.293.227.099,70

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 30**.

- 1) Saldo di atas belum termasuk Aset Tetap Peralatan dan mesin yang memiliki nilai di bawah batas kapitalisasi yang telah dicatat sebagai aset tetap *ekstrakomptabel* sebanyak 270.030 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp60.840.158.040,86 dikarenakan nilai perolehan awal tiap aset tersebut berada di bawah batas minimal perolehan awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin. sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung Dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bangunan Gedung	3.452.029.123.488,78	3.140.537.846.782,29	311.491.276.706,49	9,92
Monumen	50.124.022.292,50	50.744.570.318,50	(620.548.026,00)	(1,22)
Bangunan Menara	327.291.142.220,98	1.832.492.047,04	325.458.650.173,94	17.760,44
Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.829.803.819,88	14.936.259.829,88	5.893.543.990,00	39,46
Jumlah	3.850.274.091.822,14	3.208.051.168.977,71	642.222.922.844,43	20,02

Tabel di atas menunjukkan Gedung Dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp642.222.922.844,43 atau 20,02%. Penjelasan saldo Gedung Dan Bangunan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Saldo Awal	3.208.051.168.977,71
<i>Mutasi Tambah</i>	
1. Belanja Modal	407.489.294.374,22
2. Hutang	297.841.545,20
3. Pembayaran di Muka	15.670.313.947,00
4. Kapitalisasi Belanja Non Modal	72.875.000,00
5. Penerimaan Hibah	64.387.948.924,00
6. Reklasifikasi antar Aset Tetap	365.927.874.824,34
7. Reklasifikasi dari Aset Lainnya	138.200.000,00
8. Koreksi Pencatatan Saldo Awal	11.371.451.184,00
9. Reklasifikasi dari Aset Ekstra	20.973.000,00
10. Mutasi antar Perangkat Daerah	5.837.019.247,11
<i>Jumlah Mutasi Tambah</i>	<i>871.213.792.045,87</i>
<i>Mutasi Kurang:</i>	
1. Salah Pos Belanja Modal	(2.900,00)
2. Pembayaran Hutang	(57.042.322.417,03)
3. Pengeluaran Hibah	(24.430.038,00)
4. Reklasifikasi antar Aset Tetap	(145.540.135.864,60)
5. Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(9.100.103.368,11)
6. Reklasifikasi ke Properti Investasi	(1.825.163.160,00)
7. Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(9.480.407.906,59)
8. Dibawah Kapitalisasi	(141.284.300,00)
9. Mutasi antar Perangkat Daerah	(5.837.019.247,11)
<i>Jumlah Mutasi Kurang</i>	<i>(228.990.869.201,44)</i>
Saldo Akhir	3.850.274.091.822,14

Saldo tersebut belum termasuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang memiliki nilai di bawah batas kapitalisasi yang telah dicatat sebagai aset tetap *ekstrakomptabel* sebanyak 830 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp7.579.666.403,90 dikarenakan nilai perolehan awal tiap aset tersebut berada di bawah batas minimal perolehan awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada masing-masing Perangkat Daerah disajikan pada **Lampiran 31**.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Jalan Dan Jembatan	2.613.411.578.530,16	2.356.685.875.433,55	256.725.703.096,61	10,89
Bangunan Air	355.653.499.408,69	338.867.656.245,69	16.785.843.163,00	4,95
Instalasi	589.036.131.225,27	373.105.265.646,58	215.930.865.578,69	57,87
Jaringan	777.261.865.958,29	407.885.710.815,00	369.376.155.143,29	90,56
Jumlah	4.335.363.075.122,41	3.476.544.508.140,82	858.818.566.981,59	24,70

Tabel di atas menunjukkan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp858.818.566.981,59 atau 24,70%. Penjelasan saldo Jalan, Jaringan, Dan Irigasi beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Saldo Awal **3.476.544.508.140,82**

Mutasi Tambah

1. Belanja Modal	94.451.449.090,69
2. Kapitalisasi Belanja Non Modal	145.852.811,00
3. Penerimaan Hibah	790.840.639.163,00
4. Reklasifikasi antar Aset Tetap	3.522.730.230,00
5. Mutasi antar Perangkat Daerah	151.834.000,00

Jumlah Mutasi Tambah **889.112.505.294,69**

Mutasi Kurang:

1. Pembayaran Hutang	(23.335.518.117,00)
2. Reklasifikasi antar Aset Tetap	(6.006.686.969,00)
3. Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(450.304.888,26)
4. Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(349.594.338,84)
5. Mutasi antar Perangkat Daerah	(151.834.000,00)

Jumlah Mutasi Kurang **(30.293.938.313,10)**

Saldo Akhir **4.335.363.075.122,41**

Terdapat Penerimaan Hibah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman dari Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp570.395.270.856 diantaranya berupa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Lain-lain dan berupa Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar.

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 32**.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bahan Perpustakaan	72.138.503.436,74	58.633.611.216,39	13.504.892.220,21	23,03
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	23.639.272.060,40	22.639.455.452,40	999.816.608,00	4,42
Hewan	467.805.000,00	409.805.000,00	58.000.000,00	14,15
Tanaman	922.987.261,82	923.763.261,82	(776.000,00)	(0,08)
Aset Tetap Dalam Renovasi	1.272.748.743,08	1.272.748.743,08	0,00	0,00
Jumlah	98.441.316.502,04	83.879.383.673,69	14.561.932.828,35	17,36

Tabel di atas menunjukkan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp14.561.932.828,21 atau 17,36%. Penjelasan saldo Aset Tetap Lainnya beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Saldo Awal **83.879.383.673,69**

Mutasi Tambah

1. Belanja Modal 31.382.599.067,00
2. Kapitalisasi Belanja Non-Modal 88.887.000,00
3. Penerimaan Hibah 191.100.000,00
4. Reklasifikasi antar Aset Tetap 151.853.080,00
5. Koreksi Pencatatan Saldo Awal 37.000.000,00
6. Mutasi antar Perangkat Daerah 48.984.160,00

Jumlah Mutasi Tambah **31.900.423.307,00**

Mutasi Kurang:

1. Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Non-Modal) (10.417.836.025,00)
2. Pengeluaran Hibah
3. Reklasifikasi antar Aset Tetap (362.913.900,00)
4. Reklasifikasi ke Aset Lainnya (4.895.807.268,65)
5. Koreksi Pencatatan Saldo Awal
6. Dibawah Kapitalisasi (1.612.949.125,00)
7. Mutasi antar Perangkat Daerah (48.984.160,00)

Jumlah Mutasi Kurang (17.338.490.478,65)
Saldo Akhir **98.441.316.502,04**

Saldo tersebut belum termasuk Aset Tetap Lainnya yang memiliki nilai di bawah batas kapitalisasi yang telah dicatat sebagai aset tetap *ekstrakomptabel* sebanyak 968.817 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp33.952.103.311,84 dikarenakan nilai perolehan awal tiap aset tersebut berada di bawah batas minimal perolehan awal Aset Tetap Lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 33**.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	43.173.893.899,0	266.126.280.404,04	(222.952.386.505,04)	(83,78)
Jumlah	43.173.893.899,00	266.126.280.404,04	(222.952.386.505,04)	(83,78)

Tabel di atas menunjukkan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp222.952.386.505,04) atau (83,78%). Penjelasan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Saldo Awal **266.126.280.404,04**

Mutasi Tambah

1. Reklasifikasi antar Aset Tetap 129.925.880.665,60
2. Koreksi Pencatatan Saldo Awal 565.602.720,00

Jumlah Mutasi Tambah 130.491.483.385,60

Mutasi Kurang:

1. Penghapusan (629.409.895,30)
2. Reklasifikasi antar Aset Tetap (352.248.857.275,34)
3. Koreksi Pencatatan Saldo Awal (565.602.720,00)

Jumlah Mutasi Kurang (353.443.869.890,64)

Saldo Akhir **43.173.893.899,00**

- 1) Saldo tersebut belum termasuk Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang memiliki nilai di bawah batas kapitalisasi yang telah dicatat sebagai aset tetap *ekstrakomptabel* sebanyak 1 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp14.400.000,00 dikarenakan nilai perolehan awal tiap aset tersebut berada di bawah batas minimal perolehan awal Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

- 2) Tambahan informasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kesehatan dengan nama kontrak "Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Rehabilitasi NAPZA" pada Rumah Sakit Jiwa dengan Nomor Dokumen B.38.027/7884/ADUM/RSJ dengan nilai kontrak sebesar Rp707.003.720,00 dengan sumber dana APBD yang telah dibayar sebesar Rp565.602.720,00 dengan perkiraan jangka waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 34**.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin	(1.800.859.499.926,12)	(1.645.364.294.009,82)	(155.495.205.916,30)	9,45
Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan	(699.678.324.093,94)	(629.030.459.829,35)	(70.647.864.264,59)	11,23
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	(2.963.822.678.011,06)	(2.497.846.772.546,73)	(465.975.905.464,33)	18,66
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(21.528.746.696,40)	(19.697.428.317,40)	(1.831.318.379,00)	9,30
Jumlah	(5.485.889.248.727,52)	(4.791.938.954.703,30)	(693.950.294.024,22)	14,48

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp693.950.294.024,22 atau 14,48%. Penjelasan saldo Akumulasi Penyusutan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Saldo Awal **(4.791.938.954.703,30)**

Mutasi Tambah

1. Beban Penyusutan (644.041.431.085,09)
2. Koreksi Pencatatan Saldo Awal (65.067.217.469,00)
3. Penyusutan Barang Hibah (10.739.025.071,00)
4. Reklasifikasi dari Akumulasi Aset Lainnya (63.185.166,00)
5. Mutasi antar Perangkat Daerah (4.564.449.205,00)

Jumlah Mutasi Tambah (724.475.307.996,08)

Mutasi Kurang:

1. Akumulasi atas Aset Tetap yang Dihilangkan	19.869.762,00
2. Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Lainnya	20.862.503.976,07
3. Reklasifikasi ke Akumulasi Properti Investasi	1.395.682.465,00
4. Koreksi Pencatatan Saldo Awal	3.682.508.563,79
5. Mutasi antar Perangkat Daerah	4.564.449.205,00
<i>Jumlah Mutasi Kurang</i>	<i>30.525.013.971,86</i>
Saldo Akhir	(5.485.889.248.727,52)

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing Perangkat Daerah disajikan pada **Lampiran 35**.

5.3.1.4 Dana Cadangan

Saldo Dana Cadangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Cadangan	0,00	173.517.943.404,98	(173.517.943.404,98)	(100,00)
Jumlah	0,00	173.517.943.404,98	(173.517.943.404,98)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Dana Cadangan per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp173.517.943.404,98) atau (100,00%). Penjelasan saldo Dana Cadangan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Dana Cadangan mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp173.517.943.404,98) atau (100,00%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Dana Cadangan di Tahun 2024 tersebut ditujukan untuk mendanai Pemilukada Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
 - b. Dana Cadangan dicairkan sesuai dengan rekaman dokumen penerimaan 51.00/41.0/000001/STBP/5.02.0.00.0.00.02.0000/9/2024 pada tanggal 19 Juni 2024 sebesar Rp171.170.332.800,00.
 - c. Sisa saldo sebesar Rp2.347.610.604,98 merupakan Jasa Giro Dana Cadangan yang dipindahbukukan ke RKUD Provinsi Bali.

5.3.1.5 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	28.998.557.508,65	25.490.762.758,65	3.507.794.750,00	13,76
Aset Lain-Lain	347.585.034.803,41	348.901.073.824,66	(1.316.039.021,25)	(0,38)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(20.833.551.606,82)	(17.950.219.235,17)	(2.883.332.371,65)	16,06
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(105.330.548.116,98)	(110.960.679.101,71)	5.630.130.984,73	(5,07)
Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	3.513.765.361,49	0,00	3.513.765.361,49	100,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	7.804.246.000,00	27.241.942.000,00	(19.437.696.000,00)	(71,35)
Jumlah	261.737.503.949,75	272.722.880.246,43	(10.985.376.296,68)	(4,03)

Tabel di atas menunjukkan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp10.985.376.296,68) atau (4,03%). Penjelasan saldo Aset Lainnya beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.5.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Lisensi dan Franchise	1.570.274.160,00	1.570.274.160,00	0,00	0,00
Hak Cipta	1.044.425.000,00	1.044.425.000,00	0,00	0,00
Software	21.923.905.175,65	19.205.710.425,65	2.718.194.750,00	14,15
Kajian	3.610.050.000,00	2.820.450.000,00	789.600.000,00	28,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	849.903.173,00	849.903.173,00	0,00	0,00
Jumlah	28.998.557.508,65	25.490.762.758,65	3.507.794.750,00	13,76

Tabel di atas menunjukkan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp3.507.794.750,00 atau 13,76%. Penjelasan saldo Aset Tidak Berwujud beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Saldo Awal Bruto	25.490.762.758,65
<i>Amortisasi</i>	<i>(17.950.219.235,17)</i>
Saldo Awal Netto	7.540.543.523,48
<i>Mutasi Tambah</i>	
1. Belanja Modal	838.900.000,00
2. Reklasifikasi dari Aset Tetap	2.534.943.050,00
3. Koreksi Pencatatan Saldo Awal	261.551.700,00
<i>Jumlah Mutasi Tambah</i>	<i>3.635.394.750,00</i>

Mutasi Kurang:

1. Penghapusan	(127.600.000,00)	
<i>Jumlah Mutasi Kurang</i>		(127.600.000,00)
Saldo Akhir Bruto		28.998.557.508,65
<i>Amortisasi</i>	(20.833.551.606,82)	
Saldo Akhir Netto		8.165.005.901,83

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 36 dan Lampiran 39**.

5.3.1.5.2 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-Lain yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Rusak Berat/Usang	27.319.681.313,00	31.179.638.048,61	(3.859.956.735,61)	(12,38)
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	320.265.353.490,41	317.721.435.776,05	2.543.917.714,36	0,80
Jumlah	347.585.034.803,41	348.901.073.824,66	(1.316.039.021,25)	(0,38)

Tabel di atas menunjukkan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp1.316.039.021,25) atau (0,38%). Penjelasan saldo Aset Lain-Lain beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Saldo Awal Bruto **348.901.073.824,66**

Akumulasi Penyusutan (110.960.679.101,71)

Saldo Awal Netto **237.940.394.722,95**

Mutasi Tambah

- Reklasifikasi dari Aset Tetap 43.378.693.237,06
- Reklasifikasi antar Aset Lain Tahun Berjalan 77.000.000,00
- Reklasifikasi dari Persediaan 2.089.968.533,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal 2.287.501.420,00

Jumlah Mutasi Tambah 47.833.163.190,06

Mutasi Kurang:

- Pengeluaran Hibah (8.172.496.000,00)
- Penghapusan (36.228.882.849,82)
- Reklasifikasi ke Aset Tetap (1.079.580.000,00)
- Reklasifikasi antar Aset Lain Tahun Berjalan (77.000.000,00)
- Reklas ke Kas yang Dibatasi Penggunaan (3.513.765.361,49)

6. Koreksi Pencatatan	(77.478.000,00)	
Saldo Awal		
<i>Jumlah Mutasi Kurang</i>		(49.149.202.211,31)
Saldo Akhir Bruto		347.585.034.803,41
<i>Amortisasi</i>	(105.330.548.116,98)	
Saldo Akhirl Netto		242.254.486.686,43

5.3.1.5.2.1 Aset Rusak Berat/Usang

Saldo Aset Rusak Berat/Usang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Rusak Berat/Usang	27.319.681.313,00	31.179.638.048,61	(3.859.956.735,61)	(12,38)

Saldo Awal Bruto		31.179.638.048,61
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(24.064.854.777,71)	
Saldo Awal Netto		7.114.783.270,90
<i>Mutasi Tambah</i>		
1. Reklasifikasi dari Aset Tetap	22.856.029.908,19	
2. Reklasifikasi antar Aset Lain Tahun Berjalan	77.000.000,00	
3. Koreksi Pencatatan Saldo Awal	69.036.420,00	
<i>Jumlah Mutasi Tambah</i>		23.002.066.328,19
<i>Mutasi Kurang:</i>		
1. Penghapusan	(26.682.685.063,80)	
2. Reklasifikasi ke Aset Tetap	(92.700.000,00)	
3. Reklasifikasi antar Aset Lain Tahun Berjalan	(77.000.000,00)	
4. Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(9.638.000,00)	
<i>Jumlah Mutasi Kurang</i>		(26.862.023.063,80)
Saldo Akhir Bruto		27.319.681.313,00
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(21.049.152.557,95)	
Saldo Akhirl Netto		6.270.528.755,05

Rincian mutasi Aset Rusak Berat/Usang dan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 37 dan Lampiran 40**.

5.3.1.5.2.2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah terdiri dari Aset yang Dioperasionalkan Pihak Lain, Aset Pinjam Pakai, Aset Tetap yang Akan D hibahkan, serta Aset Lain-lain Lainnya (Kas yang Dibatasi Penggunaannya/Jamrek). Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah milik Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset yang Dioperasionalkan Pihak Lain	37.433.004.292,65	30.807.460.109,54
Aset Pinjam Pakai	77.434.725.630,00	68.979.643.130,00
Aset Tetap yang Akan D hibahkan	204.075.601.922,00	214.291.605.999,00
Aset Lain-lain Lainnya	1.322.021.645,76	3.642.726.537,51
Jumlah Bruto	320.265.353.490,41	317.721.435.776,05
Akumulasi Penyusutan Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(84.281.395.559,03)	(86.895.824.324,00)
Jumlah Neto	235.983.957.931,38	230.825.611.452,05
Saldo Awal Bruto		317.721.435.776,05
Akumulasi Penyusutan	(86.895.824.324,00)	
Saldo Awal Netto		230.825.611.452,05
Mutasi Tambah		
5. Reklasifikasi dari Aset Tetap	20.522.663.328,87	
6. Reklasifikasi dari Persediaan	2.089.968.533,00	
7. Koreksi Pencatatan Saldo Awal	2.218.465.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		24.831.096.861,87
Mutasi Kurang:		
7. Pengeluaran Hibah	(8.172.496.000,00)	
8. Reklasifikasi ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya	(3.513.765.361,49)	
9. Penghapusan	(9.546.197.786,02)	
10. Reklasifikasi ke Aset Tetap	(986.880.000,00)	
11. Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(67.840.000,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		(22.287.179.147,51)
Saldo Akhir Bruto		320.265.353.490,41
Akumulasi Penyusutan	(84.281.395.559,03)	
Saldo Akhir Netto		235.983.957.931,38

Penjelasan:**1 Aset yang dioperasikan pihak lain:**

Aset yang dioperasikan pihak lain sebesar Rp37.433.004.292,65 terdiri atas :

- a. Tanah yang dioperasikan pihak lain sebesar Rp26.036.245.359,54
Saldo tersebut merupakan nilai Aset Tanah yang dioperasikan pihak lain pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp12.397.204.609,54 pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat sebesar Rp1.299.197.500,00 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp7.112.008.000,00 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp4.702.517.250,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik sebesar Rp418.218.000,00 dan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp107.100.000,00
- b. Gedung dan Bangunan yang dioperasikan pihak lain sebesar Rp10.736.765.133,11
Saldo tersebut merupakan nilai Aset Gedung dan Bangunan yang akan dioperasikan pihak lain pada Dinas Kesehatan sebesar Rp7.052.050.183,11 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.221.781.950,00 dan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik sebesar Rp462.933.000,00
- c. Peralatan dan Mesin yang dioperasikan pihak lain sebesar Rp508.159.800,00
Saldo tersebut merupakan nilai Aset Peralatan dan mesin yang dioperasikan pihak lain pada Dinas Pendidikan sebesar Rp359.272.800,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp148.887.000,00
- d. Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dioperasikan pihak lain sebesar Rp151.834.000,00
Saldo tersebut merupakan nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dioperasikan pihak lain pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali berupa Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan senilai Rp139.969.000,00, Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air) senilai Rp1.321.000,00, dan Sumur Resapan senilai Rp10.544.000,00 .

Rincian Aset Tanah, Gedung, Peralatan Mesin dan Jalan, Jaringan dan Irigasi beserta Akumulasi Penyusutannya yang dioperasikan pihak lain dapat dilihat pada **Lampiran 38 dan Lampiran 41.**

2 Aset Pinjam Pakai

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Pinjam Pakai yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 dan saldo Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tanah	56.930.078.950,00	48.474.996.450,00
Peralatan dan Mesin	970.385.327,00	970.385.327,00
Gedung dan Bangunan	17.718.108.503,00	17.718.108.503,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.816.152.850,00	1.816.152.850,00
Jumlah Bruto	77.434.725.630,00	68.979.643.130,00
Akumulasi Penyusutan Aset Pinjam Pakai	(6.347.890.049,00)	(6.347.890.049,00)
Jumlah Netto	71.086.835.581,00	62.631.753.081,00

Rincian Aset Pinjam Pakai dapat dilihat pada **Lampiran 43.**

3 Aset Tetap yang Akan D hibahkan:

Aset Tetap yang Akan D hibahkan sebesar Rp204.075.601.922,00 terdiri atas:

a. Gedung dan Bangunan yang akan D hibahkan Sebesar Rp2.472.332.923,00

Saldo tersebut merupakan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga yaitu sebesar Rp442.028.000,00 dan Rp2.030.304.923,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Perencanaan dan Pengawasan tiga unit Bangunan Terminal dan Ibadah Lain-lain.

b. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang akan D hibahkan Sebesar Rp174.554.762.999,00

Saldo tersebut merupakan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga yang tercatat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman 174.554.762.999,00 yang terdiri dari:

No	Jenis Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah Unit	Nilai	Keterangan
1	Jalan dan konstruksi pelengkapnnya	40	53.689.538.454,00	PUPRKIM
2	Instalasi jaringan	1	809.950.000,00	PUPRKIM
3	Saluran Induk	37	104.561.664.545,00	PUPRKIM
4	Jembatan Beton dan Baja	169	8.588.819.000,00	PUPRKIM
5	Bangunan Pengaman Irigasi dan Sungai	3	6.904.791.000,00	PUPRKIM
Jumlah		250	174.554.762.999,00	

Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi serta gedung yang akan dihibahkan dapat dilihat pada **Lampiran 44**.

c. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang akan D hibahkan sebesar Rp27.048.506.000,00

Konstruksi dalam pengerjaan yang akan dihibahkan merupakan konstruksi Pelabuhan Gunaksa senilai Rp27.048.506.000,00. Pekerjaan Pelabuhan Gunaksa dimulai pada tahun 2009 yang melibatkan 3 (tiga) mata anggaran, yaitu APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Klungkung.

Nilai tersebut awalnya tercatat pada KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) Dinas Perhubungan Provinsi Bali, namun pekerjaan tersebut tidak dilanjutkan dikarenakan pekerjaan dengan mata anggaran APBD Kabupaten Klungkung terhenti sedangkan pekerjaan Provinsi Bali dan APBN dapat dilanjutkan jika pekerjaan dengan mata anggaran APBD Kabupaten Klungkung selesai dikerjakan. Konstruksi dalam pengerjaan tersebut masih dalam proses untuk dihibahkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 224 Tahun 2016 bahwa Pelabuhan Gunaksa ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi. Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang akan dihibahkan dapat dilihat pada **Lampiran 45**.

4 Aset Lain-lain Lainnya

Kelebihan bayar dari Belanja Modal pada tahun 2024 sebesar Rp1.322.021.645,76

Kelebihan bayar tidak sesuai kontrak yang menyebabkan jumlah volume berkurang dari yang seharusnya berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp298.470.888,26 pada Dinas PUPRPERKIM, berupa gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan Rp285.008.792,10 pada RSUD Bali Mandara Rp189.453.867,74 dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Rp549.088.097,66. Maka dari itu dilakukan koreksi berkurang pada aset-aset tersebut dan direklasifikasi ke Aset Lain-lain Lainnya untuk menunggu pengembalian kelebihan bayar belanja modal tersebut.

5.3.1.5.3 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas Yang Dibatasi Penggunaannya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Uang Jaminan Dan/Atau Titipan Uang Muka	3.513.765.361,49	0,00	3.513.765.361,49	100,00
Jumlah	3.513.765.361,49	0,00	3.513.765.361,49	100,00

Tabel di atas menunjukkan Kas Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp3.513.765.361,49 atau 0,00%. Penjelasan saldo Kas Yang Dibatasi Penggunaannya beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Uang Jaminan Dan/Atau Titipan Uang Muka mengalami saldo baru sebesar Rp3.513.765.361,49 atau 100,00% merupakan jaminan reklamasi dan pasca tambang Tahun 2024 yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Bali. Jaminan tersebut dipungut oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral berdasarkan Pergub Nomor 37 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda nomor 4 Tahun 2017 tentang pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp3.513.765.361,49
2. Rincian Kas yang dibatasi Penggunaannya dapat dilihat pada **Lampiran 46**.

5.3.1.5.4 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Saldo Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	7.804.246.000,00	27.241.942.000,00	(19.437.696.000,00)	(71,35)
Jumlah	7.804.246.000,00	27.241.942.000,00	(19.437.696.000,00)	(71,35)

Tabel di atas menunjukkan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp19.437.696.000,00) atau (71,35%). Penjelasan saldo Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp19.437.696.000,00) atau (71,35%)

5.3.1.6 Properti Investasi

Saldo Properti Investasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Properti Investasi Tanah	700.024.106.820,00	645.797.102.195,00	54.227.004.625,00	8,40
Properti Investasi Gedung Dan Bangunan	5.839.731.638,00	4.014.568.478,00	1.825.163.160,00	45,46
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(3.327.710.422,97)	(1.835.462.224,97)	(1.492.248.198,00)	81,30
Jumlah	702.536.128.035,03	647.976.208.448,03	54.559.919.587,00	8,42

Tabel di atas menunjukkan Properti Investasi per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp54.559.919.587,00 atau 8,42%. Penjelasan saldo Properti Investasi beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.6.1 Properti Investasi Tanah

Saldo Properti Investasi Tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Properti Investasi Tanah	700.024.106.820,00	645.797.102.195,00	54.227.004.625,00	8,40
Jumlah	700.024.106.820,00	645.797.102.195,00	54.227.004.625,00	8,40

Tabel di atas menunjukkan Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp54.227.004.625,00 atau 8,40%. Penjelasan saldo Properti Investasi Tanah beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Saldo Awal	645.797.102.195,00
<i>Mutasi Tambah</i>	
1. Reklasifikasi dari Aset Tetap	55.925.054.625,00
<i>Jumlah Mutasi Tambah</i>	<i>55.925.054.625,00</i>
<i>Mutasi Kurang:</i>	
1. Reklasifikasi ke Aset Tetap	(1.419.050.000,00)
<i>Jumlah Mutasi Kurang</i>	<i>(1.419.050.000,00)</i>
Saldo Akhir	700.024.106.820,00

5.3.1.6.2 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Saldo Properti Investasi Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.839.731.638,00	4.014.568.478,00	1.825.163.160,00	45,46
Jumlah	5.839.731.638,00	4.014.568.478,00	1.825.163.160,00	45,46

Tabel di atas menunjukkan Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp1.825.163.160,00 atau 45,46%. Penjelasan saldo Properti Investasi Gedung dan Bangunan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Saldo Awal	4.014.568.478,00
<i>Mutasi Tambah</i>	
1. Reklasifikasi dari Aset Tetap	1.825.163.160,00
<i>Jumlah Mutasi Tambah</i>	<i>1.825.163.160,00</i>
Saldo Akhir	5.839.731.638,00

Rincian mutasi Properti Investasi disajikan pada **Lampiran 47**.

5.3.1.6.3 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan	(3.327.710.422,97)	(1.835.462.224,97)	(1.492.248.198,00)	81,30
Jumlah	(3.327.710.422,97)	(1.835.462.224,97)	1.492.248.198,00	81,30

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar (Rp1.492.248.198,00) atau 81,30%. Penjelasan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Saldo Awal	(1.835.462.224,97)
<i>Mutasi Tambah</i>	
1. Beban Penyusutan	(96.565.733,00)
2. Reklasifikasi dari Aset Tetap	(1.395.682.465,00)
<i>Jumlah Mutasi Tambah</i>	<i>(1.492.248.198,00)</i>
Saldo Akhir	(3.327.710.422,97)

5.3.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kewajiban Jangka Pendek	707.808.146.491,09	1.217.203.360.639,22	(509.395.214.148,13)	(41,85)
Kewajiban Jangka Panjang	855.640.130.142,49	1.099.191.683.906,51	(243.551.553.764,02)	(22,16)
Jumlah	1.563.448.276.633,58	2.316.395.044.545,73	(752.946.767.912,15)	(32,51)

Tabel di atas menunjukkan Kewajiban per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp752.946.767.912,15) atau (32,51%). Rincian mutasi Kewajiban dapat dilihat pada Lampiran 43. Penjelasan saldo Kewajiban beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.056.472.412,70	161.434.041,00	2.895.038.371,70	1.793,33
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	243.464.798.088,00	243.464.798.088,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	21.702.352.175,15	19.013.940.968,10	2.688.411.207,05	14,14
Utang Belanja	439.584.523.815,24	954.563.187.542,12	(514.978.663.726,88)	(53,95)
Jumlah	707.808.146.491,09	1.217.203.360.639,22	(509.395.214.148,13)	(41,85)

Tabel di atas menunjukkan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp509.395.214.148,13) atau (41,85%). Penjelasan saldo Kewajiban Jangka Pendek beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Taspen	3.056.472.412,70	161.434.041,00	2.895.038.371,70	1.793,33
Jumlah	3.056.472.412,70	161.434.041,00	2.895.038.371,70	1.793,33

Tabel di atas menunjukkan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp2.895.038.371,70 atau 1.793,33%. Saldo 3.056.472.412,70 merupakan Koreksi SILPA BOSP TA 2019 s.d. TA 2022 yang belum disetorkan ke Kas Negara. Dicatat pada Utang Taspen karena tidak tersedia kode rekening akun yang cocok pada Bagan Akun Standar Aplikasi SIPD RI.

5.3.2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	243.464.798.088,00	243.464.798.088,00	0,00	0,00
Jumlah	243.464.798.088,00	243.464.798.088,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 tidak mengalami perubahan saldo dari tahun 2023. Perhitungan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan PT SMI Nomor 42 Tanggal 28 Desember 2020.

5.3.2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	4.290.844.736,53	3.434.260.325,90	856.584.410,63	24,94
Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	17.411.507.438,62	15.579.680.642,20	1.831.826.796,42	11,76
Jumlah	21.702.352.175,15	19.013.940.968,10	2.688.411.207,05	14,14

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp2.688.411.207,05 atau 14,14%. Penjelasan saldo Pendapatan Diterima Dimuka beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.2.1.3.1 Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III

Saldo Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	4.290.844.736,53	3.434.260.325,90	856.584.410,63	24,94
Jumlah	4.290.844.736,53	3.434.260.325,90	856.584.410,63	24,94

Tabel di atas menunjukkan Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp856.584.410,63 atau 24,94% yang terdiri dari 3 (tiga) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Jenis Pendapatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM	IMTA	4.145.439.774,67	3.233.102.891,59	912.336.883,08	28,22
Dinas Kelautan dan Perikanan	Izin Perikanan	118.200.961,86	173.953.434,31	(55.752.472,45)	(32,05)
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sewa BMD	27.204.000,00	27.204.000,00	0,00	0,00
Jumlah		4.290.844.736,53	3.434.260.325,90	856.584.410,63	24,94

Rincian Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III disajikan pada **Lampiran 49**.

5.3.2.1.3.2 Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah	16.527.376.353,06	14.411.732.740,57	2.115.643.612,49	14,68
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan	884.131.085,56	1.167.947.901,63	(283.816.816,07)	(24,30)
Jumlah	17.411.507.438,62	15.579.680.642,20	1.831.826.796,42	11,76

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp1.831.826.796,42 atau 11,76% yang terdiri dari 5 (lima) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut:

Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dinas Kesehatan	86.190.856,72	120.895.719,78	(34.704.863,06)	(28,71)
Dinas Perhubungan	546.180.175,25	751.629.244,25	(205.449.069,00)	(27,33)
Sekretariat Daerah	260.122.868,09	148.834.039,78	111.288.828,31	74,77
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	16.514.081.872,17	14.553.352.587,16	1.960.729.285,01	13,47
Badan Pendapatan Daerah	4.931.666,39	4.969.051,23	(37.384,84)	(0,75)
Jumlah	17.411.507.438,62	15.579.680.642,20	1.831.826.796,42	11,76

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa disajikan pada **Lampiran 49**.

5.3.2.1.4 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Pegawai	101.054.700.228,54	129.235.006.728,09	(28.180.306.499,55)	(21,81)
Utang Belanja Barang dan Jasa	27.529.724.017,50	28.048.317.006,00	(518.592.988,50)	(1,85)
Utang Belanja Hibah	0,00	149.648.189.345,00	(149.648.189.345,00)	(100,00)
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	3.060.263.152,00	(3.060.263.152,00)	(100,00)
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	315.384.317,20	57.142.325.540,03	(56.826.941.222,83)	(99,45)
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	23.335.518.117,00	(23.335.518.117,00)	(100,00)
Utang Belanja Bagi Hasil	310.684.715.252,00	362.814.553.542,00	(52.129.838.290,00)	(14,37)
Utang Belanja Bantuan Keuangan	0,00	201.279.014.112,00	(201.279.014.112,00)	(100,00)
Jumlah	439.584.523.815,24	954.563.187.542,12	(514.978.663.726,88)	(53,95)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp514.978.663.726,88) atau (53,95%). Penjelasan saldo Utang Belanja beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.2.1.4.1 Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.915.469.959,13	1.897.743.546,31	17.726.412,82	0,93
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	47.334.145.890,00	47.516.650.518,00	(182.504.628,00)	(0,38)
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	51.805.084.379,41	79.820.612.663,78	(28.015.528.284,37)	(35,10)
Jumlah	101.054.700.228,54	129.235.006.728,09	(28.180.306.499,55)	(21,81)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp28.180.306.499,55) atau (21,81%). Penjelasan saldo Utang Belanja Pegawai beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN berupa Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang terlambat diajukan pencairan terhadap kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala serta kenaikan jabatan fungsional, utang dimaksud sudah dibayarkan berdasarkan usulan dimasing-masing Perangkat Daerah.
2. Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN berupa Beban Tambahan Penghasilan ASN bulan Desember 2023 yang penganggarannya pada anggaran induk tahun berikutnya dan sudah dibayarkan keseluruhan di bulan Januari 2025.
3. Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN bulan Desember 2023 yang sudah dibayarkan di Bulan Januari 2025.

Rincian Utang Belanja Pegawai disajikan pada **Lampiran 48**

5.3.2.1.4.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Barang	18.443.094.706,00	16.559.067.647,00	1.884.027.059,00	11,38
Utang Belanja Jasa	4.975.114.152,00	4.726.135.795,00	248.978.357,00	5,27
Utang Belanja Pemeliharaan	1.917.316.865,50	4.110.234.716,00	(2.192.917.850,50)	(53,35)
Utang Belanja Perjalanan Dinas	6.598.891,00	0,00	6.598.891,00	100,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.175.899.403,00	2.652.878.848,00	(476.979.445,00)	(17,98)
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	100,00
Jumlah	27.529.724.017,50	28.048.317.006,00	(518.592.988,50)	(1,85)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp518.592.988,50) atau (1,85%). Penjelasan saldo Utang Belanja Barang dan Jasa beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Utang Belanja Barang merupakan barang pakai habis pada Rumah Sakit (BLUD) yang mengalami peningkatan karena utang baru sebesar Rp18.484.771.792,00 dan pengurangan utang karena pembayaran utang sebesar Rp16.559.067.647,00 dan sudah dibayarkan tahun 2025 dengan sumber dana dari PAD;
 2. Komponen Utang Belanja Jasa mengalami peningkatan sebesar Rp248.963.158,00 atau 5,27% yang dapat dijelaskan bahwa peningkatan tersebut karena adanya utang baru sebesar Rp4.940.271.559,00 dan pembayaran utang sebesar Rp4.659.993.390,00 serta penghapusan utang dengan Nomor Dokumen: B.11.900/6397/UPTD.PPOT-PPK/DISKES tanggal 23 Desember 2024, B.11.900/6399/UPTD.PPOT-PPK/DISKES tanggal 23 Desember 2024, B.11.900/6398/UPTD.PPOT-PPK/DISKES tanggal 23 Desember 2024 sebesar Rp30.705.444,00 dan sudah dibayarkan tahun 2025 dengan sumber dana dari PAD;
 3. Komponen Utang Belanja Pemeliharaan mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp2.192.917.850,50) atau (53,35%) yang dapat dijelaskan bahwa penurunan yang terjadi karena utang belanja pemeliharaan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp4.110.234.716,00 namun terdapat utang baru sebesar Rp1.917.316.865,50 dan sudah dibayarkan tahun 2025 dengan sumber dana dari PAD;
 4. Komponen Utang Belanja Perjalanan Dinas mengalami saldo baru sebesar Rp6.598.891,00 atau 100,00% yang dapat dijelaskan bahwa Utang Belanja Perjalanan Dinas ini merupakan Utang Perjalanan Dinas pada Rumah Sakit Bali Mandara (BLUD) dan sudah dibayarkan tahun 2025 dengan sumber dana dari PAD;
 5. Komponen Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami penurunan dikarenakan adanya utang baru sebesar Rp2.182.498.294,00 namun telah dilakukan pembayaran sebesar Rp2.652.878.848,00 dan sudah dibayarkan tahun 2025 dengan sumber dana dari PAD.
- Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa disajikan pada **Lampiran 48**.

5.3.2.1.4.3 Utang Belanja Hibah

Saldo Utang Belanja Hibah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	149.648.189.345,00	(149.648.189.345,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	149.648.189.345,00	(149.648.189.345,00)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp149.648.189.345,00) atau (100,00%). Komponen Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp149.648.189.345,00) atau (100,00%). karena telah dibayarkan pada Bulan Februari, September dan Desember 2024. Rincian Utang Belanja Hibah disajikan pada **Lampiran 48**.

5.3.2.1.4.4 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	3.060.263.152,00	(3.060.263.152,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	3.060.263.152,00	(3.060.263.152,00)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp3.060.263.152,00) atau (100,00%). Komponen Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp3.060.263.152,00) atau (100,00%). karena sudah dilakukan pelunasan selama periode Januari-Maret 2024. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa disajikan pada **Lampiran 48**.

5.3.2.1.4.5 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	315.384.317,20	56.096.078.970,00	(55.780.694.652,80)	(99,44)
Jumlah	315.384.317,20	56.096.078.970,00	(55.780.694.652,80)	(99,44)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp55.780.694.652,80) atau (99,44%). Penjelasan saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Saldo Utang Belanja Modal Bangunan Gedung pada Dinas Pendidikan sebesar Rp51.339.956.013,00 terdapat koreksi pengurangan menjadi Rp511.277.301.062,00 dan penambahan utang baru sebesar Rp17.542.772,00 dan telah dibayarkan sebesar Rp51.277.301.062,00 yang bersumber dari PAD pada tanggal 30 Juni 2024.
2. Saldo Utang Belanja Modal Bangunan Gedung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp19.805.400,00 terdapat peningkatan karena adanya utang baru sebesar Rp41.504.723,60 dan telah dibayarkan sebesar Rp19.805.400,00 yang bersumber dari PAD pada Tanggal 30 Desember 2024.
3. Saldo Utang Belanja Modal Bangunan Gedung pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp4.736.317.557,00 terdapat peningkatan karena adanya utang baru sebesar Rp256.336.821,60 dan telah dibayarkan sebesar Rp4.736.317.557,00 yang bersumber dari PAD pada Tanggal 13 Maret 2024.

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa disajikan pada **Lampiran 48**.

5.3.2.1.4.6 Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan	0,00	22.787.698.117,00	(22.787.698.117,00)	(100,00)
Utang Belanja Modal Bangunan Air	0,00	547.820.000,00	(547.820.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	23.335.518.117,00	(23.335.518.117,00)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp23.335.518.117,00) atau (100,00%). Penjelasan saldo Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp22.787.698.117,00) atau (100,00%) karena telah dilunasi selama periode Februari sampai April 2024;
2. Komponen Utang Belanja Modal Bangunan Air mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp547.820.000,00) atau (100,00%) karena telah dilunasi pada tanggal 1 Maret 2024.

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa disajikan pada **Lampiran 48**.

5.3.2.1.4.7 Utang Belanja Bagi Hasil

Saldo Utang Belanja Bagi Hasil yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	260.386.539.729,00	304.063.988.881,00	(43.677.449.152,00)	(14,36)
Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	50.298.175.523,00	58.750.564.661,00	(8.452.389.138,00)	(14,39)
Jumlah	310.684.715.252,00	362.814.553.542,00	(52.129.838.290,00)	(14,37)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Bagi Hasil per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp52.129.838.290,00) atau (14,37%). Penjelasan saldo Utang Belanja Bagi Hasil beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pencatatan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 186/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota se-Bali Triwulan IV Bulan November dan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bagi Hasil Pajak Terhutang Bulan November 2024 dengan total sebesar Rp134.314.505.108,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Kabupaten Buleleng sebesar Rp18.234.088.961,00, terdiri dari:
 - (1) PKB: Rp6.661.229.825,00
 - (2) BBNKB: Rp5.516.350.953,00
 - (3) PBBKB: Rp6.022.544.240,00
 - (4) PAP: Rp33.963.943,00
 - ii. Kabupaten Jembrana sebesar Rp11.394.042.411,00, terdiri dari:
 - (1) PKB: Rp4.421.792.129,00
 - (2) BBNKB: Rp3.661.809.885,00
 - (3) PBBKB: Rp3.289.737.228,00
 - (4) PAP: Rp20.703.169,00
 - iii. Kabupaten Tabanan sebesar Rp14.407.023.784,00, terdiri dari:
 - (1) PKB: Rp5.466.073.636,00
 - (2) BBNKB: Rp4.526.608.645,00
 - (3) PBBKB: Rp4.387.693.836,00
 - (4) PAP: Rp26.647.667,00

- iv. Kabupaten Badung sebesar Rp19.967.417.464,00, terdiri dari:
 - (1) PKB: Rp7.426.275.259,00
 - (2) BBNKB: Rp6.149.906.500,00
 - (3) PBBKB: Rp6.363.571.869,00
 - (4) PAP: Rp27.663.836,00
- v. Kabupaten Gianyar sebesar Rp15.051.103.280,00, terdiri dari:
 - (1) PKB: Rp5.661.398.539,00
 - (2) BBNKB: Rp4.688.362.667,00
 - (3) PBBKB: Rp4.679.638.026,00
 - (4) PAP: Rp21.704.048,00
- vi. Kabupaten Bangli sebesar Rp9.931.017.646,00, terdiri dari:
 - (1) PKB: Rp3.942.441.763,00
 - (2) BBNKB: Rp3.264.846.424,00
 - (3) PBBKB: Rp2.709.425.182,00
 - (4) PAP: Rp14.304.277,00
- vii. Kabupaten Klungkung sebesar Rp9.707.073.411,00, terdiri dari:
 - (1) PKB: Rp3.844.666.783,00
 - (2) BBNKB: Rp3.183.876.226,00
 - (3) PBBKB: Rp2.666.725.697,00
 - (4) PAP: Rp11.804.705,00
- viii. Kabupaten Karangasem sebesar Rp13.869.028.912,00, terdiri dari:
 - (1) PKB: Rp5.251.715.126,00
 - (2) BBNKB: Rp4.349.092.360,00
 - (3) PBBKB: Rp4.246.770.636,00
 - (4) PAP: Rp21.450.790,00
- ix. Kota Denpasar sebesar Rp21.753.709.239,00, terdiri dari:
 - (1) PKB: Rp8.213.887.750,00
 - (2) BBNKB: Rp6.802.150.460,00
 - (3) PBBKB: Rp6.712.727.249,00
 - (4) PAP: Rp24.943.780,00
- b. Bagi Hasil Pajak Terhutang Bulan Desember 2024 dengan total sebesar Rp156.369.209.144,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Kabupaten Buleleng sebesar Rp23.759.116.632,00, terdiri dari:
 - (1) PKB: Rp9.194.162.469,00
 - (2) BBNKB: Rp8.320.348.244,00
 - (3) PBBKB: Rp6.211.154.650,00
 - (4) PAP: Rp33.451.269,00
 - ii. Kabupaten Jembrana sebesar Rp15.039.464.299,00, terdiri dari:
 - (1) PKB: Rp6.103.178.587,00
 - (2) BBNKB: Rp5.523.131.815,00
 - (3) PBBKB: Rp3.392.763.236,00
 - (4) PAP: Rp20.390.661,00
 - iii. Kabupaten Tabanan sebesar Rp18.923.411.997,00, terdiri dari:
 - (1) PKB: Rp7.544.548.138,00
 - (2) BBNKB: Rp6.827.513.443,00
 - (3) PBBKB: Rp4.525.104.987,00
 - (4) PAP: Rp26.245.429,00
 - iv. Kabupaten Badung sebesar Rp26.116.169.289,00, terdiri dari:
 - (1) PKB: Rp10.250.116.429,00
 - (2) BBNKB: Rp9.275.944.223,00
 - (3) PBBKB: Rp6.562.862.377,00
 - (4) PAP: Rp27.246.260,00
 - v. Kabupaten Gianyar sebesar Rp19.733.201.973,00, terdiri dari:
 - (1) PKB: Rp7.814.145.337,00
 - (2) BBNKB: Rp7.071.488.094,00
 - (3) PBBKB: Rp4.826.192.109,00
 - (4) PAP: Rp21.376.433,00
 - vi. Kabupaten Bangli sebesar Rp13.174.310.159,00, terdiri dari:
 - (1) PKB: Rp5.441.555.245,00
 - (2) BBNKB: Rp4.924.389.228,00
 - (3) PBBKB: Rp2.794.277.327,00
 - (4) PAP: Rp14.088.359,00

- vii. Kabupaten Klungkung sebesar Rp12.870.729.799,00, terdiri dari:
- (1) PKB: Rp5.306.601.329,00
 - (2) BBNKB: Rp4.802.261.348,00
 - (3) PBBKB: Rp2.750.240.605,00
 - (4) PAP: Rp11.626.517,00
- viii. Kabupaten Karangasem sebesar Rp18.209.339.712,00, terdiri dari:
- (1) PKB: Rp7.248.679.805,00
 - (2) BBNKB: Rp6.559.764.470,00
 - (3) PBBKB: Rp4.379.768.439,00
 - (4) PAP: Rp21.126.998,00
- ix. Kota Denpasar sebesar Rp28.544.466.284,00, terdiri dari:
- (1) PKB: Rp11.337.218.571,00
 - (2) BBNKB: Rp10.259.728.055,00
 - (3) PBBKB: Rp6.922.952.395,00
 - (4) PAP: Rp24.567.263,00

5.3.2.1.4.8 Utang Belanja Bantuan Keuangan

Saldo Utang Belanja Bantuan Keuangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota	0,00	190.578.614.112,00	(190.578.614.112,00)	(100,00)
Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	10.700.400.000,00	(10.700.400.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	201.279.014.112,00	(201.279.014.112,00)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Bantuan Keuangan per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp201.279.014.112,00) atau (100,00%). Penjelasan saldo Utang Belanja Bantuan Keuangan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp190.578.614.112,00) atau (100,00%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Utang yang dicatat pada tahun 2023 merupakan utang pembayaran Kewajiban Belanja Bantuan Keuangan Infrastruktur yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi:
 - Buleleng B.31.900.1.6.3/2710/Set/BPKAD tanggal 30 April 2024;
 - Jembrana B.31.900.1.6.3/2706/Set/BPKAD tanggal 30 April 2024;
 - Tabanan B.31.900.1.6.3/2705/Set/BPKAD tanggal 30 April 2024;
 - Gianyar B.31.900.1.6.3/2704/Set/BPKAD tanggal 30 April 2024;
 - Bangli B.31.900.1.6.3/2703/Set/BPKAD tanggal 30 April 2024;
 - Klungkung B.31.900.1.6.3/2708/Set/BPKAD tanggal 30 April 2024;
 - Karangasem B.31.900.1.6.3/2709/Set/BPKAD tanggal 30 April 2024; dan
 - Denpasar B.31.900.1.6.3/2707/Set/BPKAD tanggal 30 April 2024.
 - b. Utang yang dicatat pada tahun 2023 merupakan utang pembayaran Kewajiban Belanja Bantuan Keuangan Infrastruktur yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi:

- c. Atas sisa utang yang tercatat karena secara substansi seluruh utang telah lunas, BPKAD Provinsi Bali menerbitkan Berita Acara Koreksi Saldo Awal Nomor B.31.900.1.6.3/8783/Set/BPKAD tanggal 31 Desember 2024 sebagai dasar penghapusan saldo sisa utang yang bersangkutan.
2. Komponen Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp190.578.614.112,00) atau (100,00%) yang dapat dijelaskan sebagai berikut
 - a. Utang yang dicatat pada tahun 2023 merupakan utang pembayaran Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa se-Bali yang dicatat sesuai dengan dasar dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Nomor B.31.900.1.6.3/2711/Set/BPKAD tanggal 30 April 2024 yang telah terbayar seluruhnya pada tahun 2024.
 - b. Atas kesalahan pencatatan utang pada tahun 2023 akibat adanya pergerakan data jumlah pegawai pada Pemerintah Desa dari Berita Acara Rekonsiliasi yang tidak disampaikan sehingga muncul perbedaan pengajuan nilai pembayaran BKK pada tahun 2024, BPKAD Provinsi Bali B.31.900.1.6.3/4053/Set/BPKAD tanggal 30 Juni 2024.

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa disajikan pada **Lampiran 48**.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Kewajiban Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang kepada Pemerintah Pusat	852.126.364.781,00	1.095.591.162.869,00	(243.464.798.088,00)	(22,22)
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	3.513.765.361,49	3.600.521.037,51	(86.755.676,02)	(2,41)
Jumlah	855.640.130.142,49	1.099.191.683.906,51	(243.551.553.764,02)	(22,16)

Tabel di atas menunjukkan Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp243.551.553.764,02) atau (22,16%).

5.3.2.2.1 Utang kepada Pemerintah Pusat

Saldo Utang kepada Pemerintah Pusat yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri	852.126.364.781,00	1.095.591.162.869,00	(243.464.798.088,00)	(22,22)
Jumlah	852.126.364.781,00	1.095.591.162.869,00	(243.464.798.088,00)	(22,22)

Tabel di atas menunjukkan Utang kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp243.464.798.088,00) atau (22,22%).

5.3.2.2.1.1 Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri

Saldo Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	852.126.364.781,00	1.095.591.162.869,00	(243.464.798.088,00)	(22,22)
Jumlah	852.126.364.781,00	1.095.591.162.869,00	(243.464.798.088,00)	(22,22)

Tabel di atas menunjukkan Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp243.464.798.088,00) atau (22,22%). Penjelasan saldo Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang merupakan Pinjaman Daerah yang berasal dari Pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang digunakan untuk mendanai Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung. Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 42 Tanggal 28 Desember 2020 dan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-201/SMI/1221 Tentang Perjanjian Perubahan Pertama terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 42 Tanggal 28 Desember 2020, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Jumlah Pinjaman setinggi-tingginya Rp1.500.000.000.000,00 (Limit Pinjaman);
 - b. Jangka waktu pinjaman 96 (Sembilan puluh enam) bulan termasuk masa tenggang 24 (dua puluh empat) bulan. Masa tenggang dimulai sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kali;
 - c. Masa pencairan pinjaman adalah sejak tanggal pencairan pertama pinjaman sampai dengan tanggal 30 Juni 2022; dan
 - d. Bunga dan biaya pinjaman. Bunga sebesar 0,00%. Biaya Pinjaman yang wajib dibayar:
 - Biaya pengelolaan pinjaman sebesar 0,185%
 - 1) Untuk pertama kalinya sebesar 0,185% dari limit pembayaran sebelum efektifnya perjanjian.
 - 2) Untuk tahun-tahun berikutnya sebesar 0,185% dari jumlah baki debit/outstanding/terutang pada tanggal ulang tahun perjanjian, yang dibayarkan selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal ulang tahun perjanjian yang berkenaan.
 - Biaya provisi sebesar 1% dari jumlah kumulatif pinjaman yang dicairkan, dikenakan satu kali yang dibayar saat pencairan tahap ketiga pinjaman atau sebelum tanggal terakhir masa pencairan.
2. Akibat dinamika yang berkembang dalam proses perencanaan fisik Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, maka Pemerintah Provinsi Bali mengajukan permohonan Adendum. Sampai dengan akhir TA 2023 Pemerintah Provinsi Bali telah mengajukan permohonan Adendum sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Adendum I - Berdasarkan Surat Nomor: T.29.600/13814/CK/PUPRKIM tanggal 18 Oktober 2021 terdapat dua hal yang dimohonkan adendum yaitu terkait revisi KAK Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali dan perpanjangan masa pencairan pinjaman (Availability period) sampai dengan paling lambat bulan Juni 2022. Permohonan adendum disetujui pada tanggal 24 Desember 2021 melalui Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-201/SMI/1221 tentang Perjanjian

Perubahan Pertama terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 42 tanggal 28 Desember 2020;

- b. Adendum II - Berdasarkan Surat Nomor: T.29.600/8768/CK/PUPRKIM tanggal 27 Mei 2022, Pemerintah Provinsi Bali mengajukan permohonan revisi KAK untuk perpanjangan waktu pencairan pinjaman sampai dengan 30 Oktober 2022. Permohonan adendum disetujui pada tanggal 12 Oktober 2022 melalui Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-136/SMI/1022 tentang Perjanjian Perubahan Kedua terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 42 tanggal 28 Desember 2020; dan
 - c. Adendum III - Berdasarkan Surat Nomor: T.29.600/8768/CK/PUPRKIM tanggal 27 Mei 2022, Pemerintah Provinsi Bali mengajukan permohonan agar dapat memanfaatkan dana sisa hasil tender pinjaman yang bersumber dari dana sisa pengadaan lahan dan pematangan lahan untuk kegiatan perencanaan dan pematangan lahan lanjutan dari Pusat Kebudayaan Bali. Permohonan adendum disetujui pada tanggal 25 Oktober 2022 melalui Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-147/SMI/1022 tentang Perjanjian Perubahan Kedua terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 42 tanggal 28 Desember 2020.
3. Pembayaran cicilan utang bagian lancar PEN PT SMI dilakukan melalui pemotongan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dari alokasi Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/KM.7/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dan Pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 Untuk Periode Penyaluran Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2024. Dengan demikian, total pembayaran cicilan PEN melalui pemotongan DAU selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp243.464.798.088,00.

5.3.2.2.2 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Saldo Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta	3.513.765.361,49	3.600.521.037,51	(86.755.676,02)	(2,41)
Jumlah	3.513.765.361,49	3.600.521.037,51	(86.755.676,02)	(2,41)

Tabel di atas menunjukkan Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp86.755.676,02) atau (2,41%).

5.3.2.2.2.1 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta

Saldo Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah	3.513.765.361,49	3.600.521.037,51	(86.755.676,02)	(2,41)
Jumlah	3.513.765.361,49	3.600.521.037,51	(86.755.676,02)	(2,41)

Tabel di atas menunjukkan Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp86.755.676,02) atau (2,41%).. Saat berlakunya UU no 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan 90 Izin Usaha Pertambangan tahap Operasi Produksi, golongan batuan dan menempatkan jaminan reklamasi dan pascatambang pada Bank BPD Bali dan Bank BRI sesuai ketentuan.

Selanjutnya terbit UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dimana kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menjadi kewenangan pemerintah pusat. Saat kewenangan di pusat beberapa izin sudah berakhir masa berlakunya, sesuai ketentuan seharusnya dapat diperpanjang 2 kali, namun tidak dapat melakukan perpanjangan.

Kemudian terbit Perpres 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengembalikan kewenangan pengelolaan pertambangan (batuan, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu) ke Pemerintah Provinsi.

Saat kewenangan kembali ke Provinsi sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, Izin yang memiliki jaminan reklamasi dan pascatambang belum bisa semuanya memperpanjang izin maupun memperoses izin baru, karena terkendala kesesuaian kegiatan penggunaan ruang (PKKPR) untuk kegiatan pertambangan (perubahan tata ruang di Kabupaten).

Perubahan regulasi seperti tersebut diatas, berpengaruh terhadap kondisi jaminan reklamasi dan pascatambang di provinsi bali, yaitu :

- Sebanyak 14 pengusaha tambang yang mengakhiri kegiatan usaha pertambangannya (tidak memperpanjang izinnya) dan sudah melakukan reklamasi dan pascatambang, mengajukan permohonan pencairan dan disetujui. Sudah dibayarkan oleh Bank ke Pengusaha sebesar pagu penempatan ditambah bunganya.
- Sebanyak 76 pengusaha masih menunggu perubahan tata ruang dan akan memproses izin kembali.

Data nominal reklamasi dan pascatambang (Pokok dan Bunga) disajikan pada **Lampiran 46**.

5.3.3 Ekuitas

Saldo Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas	17.602.612.654.466,05	15.648.183.735.009,10	1.954.428.919.457,26	12,49
Jumlah	17.602.612.654.466,05	15.648.183.735.009,10	1.954.428.919.456,95	12,49

Tabel di atas menunjukkan Ekuitas per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp1.954.428.919.457,31 atau 12,49%. Saldo Ekuitas yang disajikan di Neraca telah sama dengan saldo ekuitas akhir sebagaimana telah diungkapkan dalam penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas poin **5.6.4**